

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI DESA TANJUNG AMAN KECAMATAN KOTABUMI
SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin**

OLEH:

FIRDA SEPTIYANI

NPM. 1931040082



Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI DESA TANJUNG AMAN KECAMATAN KOTABUMI
SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin**

OLEH:

FIRDA SEPTIYANI

NPM. 1931040082

Pembimbing I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P

Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

ABSTRAK

Minimnya partisipasi politik perempuan membuat organisasi Kepal Utara perlu meningkatkan partisipasi politik perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Dan Untuk mengetahui Tingkat Pengaruh organisasi Kesatuan perempuan lampung Utara Dalam Pendidikan dan Sosialisasi Politik di masyarakat pada di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif menjelaskan atau menggambarkan kondisi Partisipasi Politik Perempuan berdasarkan keadaan lapangan dengan ada apanya sesuai dengan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Terlihat dari upaya pendidikan politik oleh organisasi kesatuan perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman, di 10 dusun baik di dusun 1,3,4,5,7,8,10 yang ada di Desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan terlihat optimal dengan terlihatnya meningkatnya partisipasi politik perempuan di Desa Tanjung Aman. Berdasarkan Data yang ada pendidikan politik perempuan di desa tersebut sudah meningkat terlihat dari pengetahuan mereka terhadap politik dan keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan politik, maupun keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan politik. Berdasarkan Perbandingan data "pemilukada" di desa, perempuan pada tahun 2014-2019 itu ada peningkatan partisipasi dalam pemilihan maupun ikut maju dalam pencalonan, pada tahu 2014 menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi sebesar 72 % pemilih perempuan dari 17.096 penggunaan hak pilih, yang kemudian meningkat menjadi 80% pemilih perempuan dari 23.022 pengguna hak pilih. Kemudian Terlihat nya adanya pencalonan perempuan yang ikut maju dalam "pemilukada" tersebut. Terlihat meningkatnya partisipasi politik tersebut ini dihubungkan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kesatuan perempuan lampung utara yang berinisiatif melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di desa tersebut dengan memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, penyadaran, penyuluhan , pendampingan, pelatihan, serta diskusi-diskusi politik ataupun seminar

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Organisasi, Edukasi



ABSTRACT

The lack of women's political participation means that the North Kepal organization needs to increase women's political participation. The aim of this research is to determine the increase in women's political participation by the North Lampung Women's Association organization in Tanjung Aman Village, South Kotabumi District, North Lampung Regency and to determine the level of influence of the North Lampung Women's Association organization in education and political socialization in the community in Tanjung Aman Village, District. South Kotabumi, North Lampung Regency. The method used is a descriptive qualitative method that explains or describes the conditions of Women's Political Participation based on field conditions and what is happening according to the results of Observations, Interviews and Documentation.

It can be seen from the political education efforts by the North Lampung women's unity organization in Tanjung Aman Village that in 10 hamlets, including hamlets 1, 3, 4, 5, 7, 8, and 10, in Tanjung Aman Village, South Kotabumi District, it looks optimal with increasing participation. women's politics in Tanjung Aman Village. Based on existing data, women's political education in the village has increased, as can be seen from their knowledge of politics and their participation in political decision-making, as well as their participation in political activities. Based on a comparison of regional election data in villages, in 2014–2019, women saw an increase in participation in elections and running for candidacy. In 2014, there was a decrease in participation by 72% of female voters out of 17,096 who exercised their right to vote, which then increased to 80% of female voters out of 23,022 voting rights users. Then it was seen that there were women's candidacies taking part in the pemilukada. It can be seen that the increase in political participation is related to the activities carried out by the North Lampung Women's Unity Organization, which took the initiative to make sustainable efforts to increase women's political participation in the village by providing

political education, political socialization, awareness, counseling, mentoring, training, and discussions. political discussions or seminars

Keywords: Political Participation, Organization, Education



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Septiyani
NPM : 1931040082
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuludin Dan Studi Agama

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”** adalah Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023

Penulis,



Firda Septiyani

NPM. 1931040082



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULLUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN OLEH KESATUAN PEREMPUAN
LAMPUNG UTARA DI DESA TANJUNG AMAN
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nama : Firda Septiyani
NPM : 1931040082
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 1978013020110112004

Gesit Yudha, M.I.P
NIP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103122006011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULLUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara” disusun oleh Firda Septiyani, NPM : 1931040082, Program Studi : **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag

Sekretaris : Dwi Rosmawati, M.Kes

Penguji I : Abd. Qohar, M.Si

Penguji II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

Penguji III : Gesit Yudha, M.I.P

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,



Dr. Ahmad Isaeni, MA.
NIP. 197403302000031001

MOTTO

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَ فِي ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(QS. Al-Baqarah:228)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur dan Alhamdulillah Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Ayahandaku tercinta Bapak Sahdan Samir dan Ibundaku Tersayang Yunani atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam bekerja keras dan berdoa untuk kebaikan dan masa depanku, hanya Allah yang bisa membalas segalanya kebaikan kalian.
2. Bungku Tersayang Abdi Yansyah, S.H Dan Atika Tasya Amd. Kep Adiku tersayang Rio Remansyah Dan Fanesa Shofi Salsabila, Keponakan pertamaku Ayunira Diyansa dan seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan selama ini
3. Kekasihku Seprizal, S.Sos terimakasih sudah bersama kepadaku selama 7 tahun ini, yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilanku.
4. Terkhusus Sepupuku tersayang Zania, Alvina Dan teman temanku Alm Citra, Siska, Yulina, Vitri, Bella, Ade, Revina, Eliana Dan Kawan Seperjuangan.
5. Teman-teman jurusan Pemikiran Politik Islam, angkatan 2019 terimakasih atas rasa saling support , saling mendoakan selama ini, terus berjuang dan berkarya.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Firda Septyani adalah Putri Kedua dari pasangan suami istri Bapak Sahdan Samir dan Ibu Yunani. Dilahirkan pada tanggal 10 September 2001 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

Jenjang pendidikan formal yang penulis jalani adalah:

1. TK Dharma Wanita Tatakarya Lulus pada tahun 2007
2. SDN 1 Tatakarya Lulus pada tahun 2013
3. SMP N 1 Kotabumi Lulus pada tahun 2016
4. SMAN 1 Abung Timur Lulus pada tahun 2019

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Yang Membuat,

Firda Septyani

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah, yang berhak dipuji karena nikmat yang begitu besar telah diberikan kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-Nya, karena Dia-lah yang mengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dan alhamdulillah telah menyelesaikannya dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku ketua program studi Pemikiran Politik Islam dan Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku sekretaris program studi Pemikiran Politik Islam yang telah membantu dan mempermudah dalam penulisan skripsi
4. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku pembimbing satu dan Bapak Gesit Yudha, M.I.P selalu Pembimbing dua yang telah berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
6. Kepala dan staff karyawan Perpustakaan Pusat Fakultas Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah membantu

dalam kelancaran dalam mencari referensi yang berkaitan dengan skripsi

7. Pihak Organisasi Kepal Utara yang telah membantu memberi informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi

Akhirnya ungkapan Doá terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023

Penulis



Firda Septiyani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xu
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Kerangka Pikir.....	24

BAB II PARTISIPASI POLITIK, POLITIK PEREMPUAN

A. Partisipasi Politik	29
1. Pengertian Partisipasi Politik	29
2. Faktor Faktor Partisipasi Politik.....	32
3. Tipologi Partisipasi Politik.....	35
4. Bentuk Partisipasi Politik	37
B. Pemilihan Umum	38
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	38
2. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum.....	40

3. Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan.....	41
4. Posisi Perempuan Dalam Pemilu.....	45
C. Pendidikan Politik.....	47
1. Pengertian Pendidikan Politik	47
2. Tujuan Pendidikan Politik.....	48
3. Sosialisasi Politik	50
D. Organisasi	52
1. Organisasi Masyarakat	52
2. Organisasi Keagamaan	53
3. Organisasi Sosial	56

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepala Utara.....	61
1. Sejarah Singkat Kepala Utara	61
2. Visi Misi Kepala Utara	63
3. Tujuan Kepala Utara.....	64
4. Fungsi Kepala Utara	65
5. Struktur Kepengurusan Kepala Utara.....	67

BAB IV PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA

A. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara.....	69
B. Tingkat Pengaruh Kepala Utara Dalam Pendidikan dan Sosialisasi Politik di Masyarakat pada di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	81

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan	89
B. Rekomendasi	91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi Skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yang peneliti tulis ini. Adapun judul skripsi ini ialah **“Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”** Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul Skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul Skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Partisipasi Politik adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan, pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Politik diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan¹ Dalam Hal ini Desa Tanjung Aman memiliki jumlah penduduk 6.359 Jiwa, yang tersebar di 10 Dusun Dan 43 RT.

Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara) berada di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara adalah salah satu yang bergerak melakukan banyak aktivitas pemberdayaan untuk masyarakat khusus perempuan, dengan melakukan pemberdayaan di bidang politik yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran politik. Dalam hal ini, Organisasi Kepal Utara sebagai lembaga non formal yang memiliki tugas yang terfokus pada organisasi yang memiliki ide ide atau gagasan politik dan bernegara, karena tidak ada organisasi atau lembaga pada saat itu yang peduli terhadap kepentingan perempuan, dengan adanya pandangan dan pemikiran yang sama. Kesatuan Perempuan Lampung Utara ini muncul atas pertimbangan kepentingan masyarakat wujud nyatanya sebuah LSM atau organisasi non formal.

¹ Inu Kencana Syafieie, *Ilmu Politik, Edisi 2*, (Jakarta: Renika Cipta, 2019), 9.

Secara Operasional yang dimaksud “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara” Bahwa suatu studi tentang Kegiatan kegiatan yang berdampak pada peningkatan partisipasi politik Kepala Utara dalam membangun partisipasi politik, sehingga meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam memilih dengan cara memberikan pengetahuan politik atau membangun kesadaran politik. Berangkat yang akan dilihat terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Utara untuk meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan yaitu melalui penyuluhan sebagai media menjadikan dirinya berdaya dan mandiri serta paham terhadap hak-hak mereka untuk menyalurkan suara, menentukan calon pemimpin. dalam hal ini, permasalahan yang terjadi bahwa partisipasi politik perempuan saat ini Rendah khususnya di Desa Tanjung Aman, maka dengan itu perlu adanya inisiatif dari Kepala Utara dalam meningkatkan partisipasi politik, sehingga masyarakat tersebut partisipasi politik nya dapat meningkat.

B. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai partisipasi politik wanita di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah “*representasi*” wanita yang rendah di dalamnya. Masalahnya sangat jelas, yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin wanita yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya “pengambilan keputusan” di mana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika wanita masih juga dimarginalisasikan atau didikriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.²

² Ade Muslimat, *Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol 7, No 2, Juli Desember 2020.

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender dan stereotype telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengecualian perempuan dari kehidupan politik formal. Kita dapat melihat akar dari persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di bidang politik.

Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak ada batasan mengenai partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan mereka dilembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah.

Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka gambaran lain yang melengkapinya adalah persoalan kualitas. Partisipasi perempuan di bidang politik selama ini, cenderung memainkan peran sekunder. Mereka dilihat sebagai pemanis atau penggembira hal ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Permasalahan politik sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput,

memberikan sanksi tegas pihak *money politics*, Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat.

Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan serius dari Organisasi Kepal Utara dalam menangani rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sementara Organisasi Kepal Utara telah melaksanakan pendidikan politik kepada Perempuan Politik setiap tahunnya. Pendidikan politik merupakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi.³

Ketika berbicara tentang peran politik wanita dalam Islam berarti berbicara tentang peran wanita sebagai bagian masyarakat. Islam memandang bahwa wanita sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri wanita sendiri maupun masyarakat secara umum.⁴ sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rad'u Ayat 11) sebagai berikut :

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ حَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

مِنَ وَالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada

³Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia* (Model Suatu Pengantar). Bandung. Sinar Baru Algensindo. 56.

⁴Siti Muslikhati, *Feminisme Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2004),139.

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek.

Pada Kenyataannya masyarakat belum menunjukkan tingkat partisipasi dalam pemilu dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi itu belum begitu ideal dan masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya tidak di dasarkan oleh pengetahuan yang baik tentang calon yang akan mereka pilih. Dengan demikian mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang siapa-siapa saja orang yang memimpin. Asumsinya karena pemberdayaan politik yang dilakukan terhadap masyarakat itu tidak dilakukan oleh komponen politik. Tugas dan fungsi pemberdayaan politik itu ada pada partai politik, tetapi partai politik belum menjalankan fungsinya, sehingga fungsi itu dijalankan oleh Organisasi-organisasi non formal yang dalam hal ini adalah Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara).

Partisipasi politik menurut Hantington dan Nelson yang menyatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik pada dasarnya

adalah kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik.⁵

Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Kepala Utara merupakan sarana membentuk karakter kepemimpinan bagi kaum perempuan politik.. Bila melihat potensi perempuan politik yang cukup besar tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik sangatlah penting untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami oleh rakyat serta perempuan politik agar rakyat tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik oleh Kepala Utara diharapkan kaum perempuan menjadi “*melek politik*” agar bersinergi dalam usaha pembangunan serta partisipatif, karena rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, sadar hukum, kritis, aktif dan kreatif serta konstruktif.

Dalam situasi ini, perempuan diberi kebebasan untuk bergabung dengan berbagai partai dan organisasi politik perempuan lainnya serta menyediakan ruang yang memadai untuk aspirasi. Akan tetapi, sering kali keterlibatan perempuan terbatas pada bidang yang sangat sempit, tidak ada kemerdekaan, dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik. Namun begitu seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik. Fenomena peran perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai organisasi perempuan misalnya Organisasi Kepala Utara yang sangat eksplisit dalam keterbatasan dan dependensi.

Secara normatif, perempuan selayaknya mempunyai hak berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga berupaya menampung semua aspirasi dan kepentingannya. yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratis yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for*

⁵Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta. 9-10.

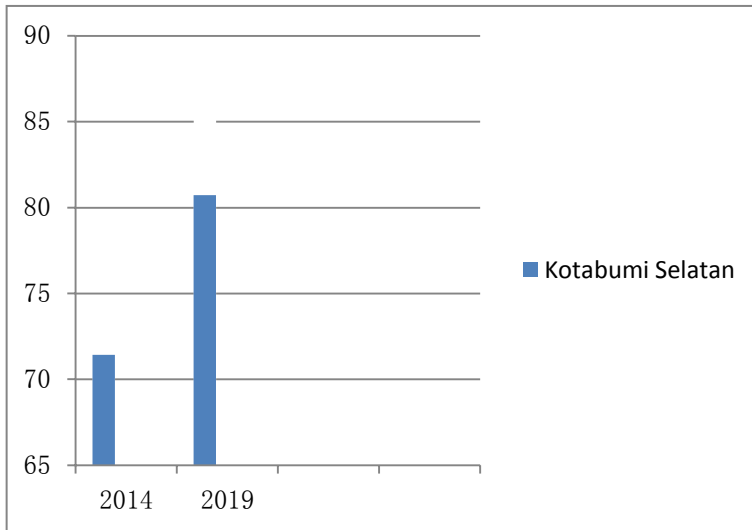
elections). Tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan mempunyai hak berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga berupaya menampung semua aspirasi dan kepentingannya. di antaranya; hak untuk mengungkapkan pendapat, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Oleh sebab itu Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat di upayakan antara lain dengan melakukan pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Masyarakat yang tidak andil dalam partisipasi politik akan mudah untuk dikuasai, kekuasaan itu hanya di bangun berdasarkan pilihan oleh masyarakat yang memilih saja. Masyarakat yang memilih perlu mengetahui tentang calonnya ini seperti apa Maka diperlukan upaya pemberdayaan politik perempuan antara lain untuk membangun partisipasi politik dalam hal memilih.

Dalam Hal ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menggelar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu.

Sosialisasi kali ini mengundang Organisasi perempuan seperti Organisasi Kepal Utara yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini bertujuan Untuk menambah wawasan kepada perempuan terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan partisipatif, serta Untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran atau kecurangan selama proses pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2019.

Grafik 1.1
Tingkat Partisipasi Pemilu Perempuan Tahun 2014 –2019 Di
Kotabumi Selatan



Sumber Data: Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara), 2022⁶

Penelitian menjelaskan bahwa dari perbandingan data pemilu perempuan tahun 2014 -2019 itu ada peningkatan partisipasi dalam pemilihan, yang peningkatan sangat signifikan pada tahun 2014 menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi sebesar 72 % pemilih perempuan dari 17.096 penggunaan hak pilih. Kemudian pada pemilu tahun 2019, secara bertahap partisipasi perempuan meningkat pada tahun tersebut menjadi 80% pemilih perempuan dari 23.022 Penggunaan hak pilih. Berdasarkan data hasil 2019 menunjukkan adanya keberhasilan Penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat Khususnya perempuan di Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Ukuran pemberdayaan politik berdaya atau tidak berdaya dilihat dari tingkat partisipasi, meningkatnya partisipasi ini dihubungkan dengan kegiatan Kepal Utara yang intensif memberikan penyadaran, penyuluhan diskusi-diskusi atau seminar agar masyarakat sadar bahwa

⁶ Ampera Wati (Ketua Kepal Utara), Wawancara 08 November 2022.

partisipasi dalam memilih itu adalah kewajiban.

Aturan ini menjelaskan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini memberikan ruang dan dorongan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan sebesar 30% sudah diakomodasi dalam UU Pemilu. Jika dirunut ke belakang, terlihat jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia sudah mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang Pemilu No. 12 tahun 2003, dalam UU ini menegaskan peningkatan aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun lokal.

Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. UU ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-undang No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Kemudian dukungan pemerintah terhadap partisipasi keterwakilan perempuan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat minimal 30% keterwakilan perempuan. Aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini mengindikasikan perhatian serius dari pemerintah dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Akan tetapi walaupun dasar hukumnya sudah ada, realita pada pemilu 2009, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% belum berhasil diwujudkan. Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 18% atau 103 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota dewan.⁷

Menurut wakil ketua MPR Melani Leimena Suharli,

⁷ Nurdin, Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik, Jurnal Parapolitika, Vol 2, No 2, 2021.

keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2009 sudah mengalami kemajuan dibanding pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004, jumlah anggota dewan perempuan hanya 11%. Bahkan pada pemilu 1999, hanya 9% anggota legislatif perempuan. Jika dilihat dari hasil pemilu pada dua periode di atas, terlihat perkembangan jumlah keterwakilan perempuan diparlemen walaupun pada dasarnya belum mencapai kuota yang ditetapkan yaitu 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen ini kemudian diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan.

Partisipasi memilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan, Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Perempuan dapat berperan aktif dalam Pemilu seperti Menjadi Penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan, Menjadi mitra Penyelenggara Pemilu untuk mensosialisasikan pentingnya menjadi Pemilih Cerdas agar tercipta Pemilu yang berkeadilan serta Aktif melakukan pemantauan dengan menjadi Pemantau yang teregistrasi.

Partisipasi memilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan, Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang

menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Permasalahan yang terjadi bahwa partisipasi politik perempuan saat ini Rendah, karena kurangnya pendidikan berpolitik pada kaum perempuan, kurangnya kegiatan penyuluhan pendidikan politik, sehingga masyarakat dalam segi pengetahuan tentang adanya politik sangat kurang, maka dengan itu perlu adanya peningkatan partisipasi politik yang dilakukan oleh organisasi Kepal Utara, sehingga partisipasi perempuan di harapkan dapat meningkat.

Dalam Melihat Permasalahan diatas, maka penulis dapat mengkaji penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan diatas, Riris Resita Simamora, jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung 2019. Dengan Judul “perempuan dalam politik (studi anggota legislatif perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah lampung timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam parlemen terutama anggota legislatif dilampung timur masih sangat jauh untuk mencapai 30% karena berbagai faktor masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa politik sesuatu yang kejam keras dan saling menyingkirkan hal ini membuat perempuan berada pada zona nyaman sebagai ibu rumah tangga, rendahnya finansial pada perempuan membuat rendahnya keterwakilan, perempuan masih ditempatkan pada no urut bawah, rendahnya pendidikan perempuan juga mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan.

Berdasarkan Uraian Diatas yang penulis telah memaparkan maksud dari judul ini yakni suatu penelitian yang memaparkan dan menganalisis tentang “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, di perlakukan upaya yang berkelanjutan dalam melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik ,sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan Sub Fokus penelitian ini pada penelitian ini adalah terkait pada Rendahnya Kesadaran Politik Perempuan Pada Masyarakat Kotabumi Selatan

Sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Kepala Organisasi Kepal Utara dalam meningkatkan pengetahuan politik
2. Advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Kepal dalam melakukan kesadaran pengetahuan politik
3. Penyuluhan, Pelatihan, Dan Pendampingan kepada masyarakat dalam hal politik

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah penulis ungkapkan di latarbelakang masalah ,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana Tingkat Pengaruh Kepala Utara Dalam Pendidikan dan Sosialisasi Politik di masyarakat pada di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui Tingkat Pengaruh Kepala Utara Dalam Pendidikan dan Sosialisasi Politik di masyarakat pada di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini , peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Sebagai penguatan teori pemberdayaan politik. Bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi jika mereka memiliki kesadaran politik, dengan harapan memberikan keilmuan informasi atau kontribusi baru bagi ilmu pengembangan masyarakat dalam peningkatan politik sebagai bentuk partisipasi politik.
2. Secara Praktis, Penelitian ini Dapat memberikan masukan kepada Organisasi-organisasi lain yang berhubungan dalam pemberdayaan politik. Pentingnya pemberdayaan politik bagi masyarakat untuk menambah sumber wawasan bagi pembaca dan sebagai evaluasi Pemberdayaan yang dapat dipilih dalam Peningkatan politik perempuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, dalam penulisan skripsi ini mencoba melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sebagai bahan perbandingan bagi penelitian ini, penulis menemukan skripsi yang memiliki kesamaan judul yang akan penulis jadikan sebuah acuan, perbandingan dan keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu:

1. Riris Resita Simamora, jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung 2019. Dengan Judul “perempuan dalam politik (studi anggota legislatif perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah lampung timur)”. Dalam Skripsi ini membahas bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan pada kaum perempuan. Melalui pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan berguna untuk menghasilkan partisipasi perempuan dalam pemilu dan perempuan-perempuan yang mampu meningkatkan kuota 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam parlemen terutama anggota legislatif dilampung timur masih sangat

jauh untuk mencapai 30% karena berbagai faktor masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa politik sesuatu yang kejam keras dan saling menyingkirkan hal ini membuat perempuan berada pada zona nyaman sebagai ibu rumah tangga, rendahnya finansial pada perempuan membuat rendahnya keterwakilan, perempuan masih ditepatkan pada no urut bawah, rendahnya pendidikan perempuan juga mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan.⁸

2. Ahclak Asmar Yasa, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar 2018. Dengan Judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap pemilihan pemilu di Kelurahan Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat mengenai Partisipasi Politik Masyarakat pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Gowa kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemilu dalam pemilihan kepala daerah serta makna yang terkandung dalam sebuah pemilu yang diatur dalam Al-Quran. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pertama masyarakat pemilih pemula sudah ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah kedua bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik (aktif) yang dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan, dengan harapan sosok pemimpin yang⁹ terpilih dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi.
3. Siti Masruroh, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Istitut Negeri

⁸Ririn Resita Simamora, Perempuan Dalam Politik Studi Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur, (Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019).

⁹Ahclak Asmar Yasa, ‘Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilihan Pemula Di Kelurahan Kaluku Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa)’. (Skripsi Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin.

Raden Intan Lampung 2015. Dengan judul “Emansipasi Wanita Dan Pemberdayaan Politik Perempuan (Studi Caleg Perempuan di Kecamatan Natar Pada Periode Pemilu 2014)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang Pandangan caleg perempuan tentang emansipasi wanita tahun 2014 dalam pemberdayaan politik perempuan dan untuk mengetahui bagaimana hubungan bagaimana hubungan emansipasi wanita terhadap pemberdayaan politik perempuan.¹⁰

4. Rezky Awaliyah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022, dengan judul “Partisipasi Politik Pemilu Perempuan Dalam Meningkatkan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar Pada tahun 2020” Dalam Skripsi ini membahas tentang adanya dua bentuk partisipasi (a) partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. partisipasi aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan umum.(b) partisipasi pasif adalah partisipasi yang dilakukan dengan menaati,menerima,serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah.¹¹
5. Nita Puspita, Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020, dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa), Dalam Skripsi ini membahas

¹⁰Siti Masruroh, ‘Emansipasi Wanita Dan Pemberdayaan Politik Perempuan, (Studi Kasus Caleg Perempuan Di Kecamatan Natar Pada Pemilu 2014)’, (Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).

¹¹Rezky Awaliyah, Partisipasi Politik Pemilu Perempuan Dalam Meningkatkan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar Pada Tahun 2020, (Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022).

tentang tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Desa Plampang cukup tinggi berdasarkan hasil rekapitulasi akhir desa Plampang. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur tahun 2018 adalah rasa ingin tahu dari masyarakat, terutama perempuan, untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam proses pemilu.¹²

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu di atas telah memberikan referensi dan rujukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis mengenai penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana penelitian terdahulu tersebut sangat berbeda dengan isi skripsi yang penulis teliti. Penulis mengambil judul skripsi tentang “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di desa tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara” Skripsi ini membahas tentang bagaimana meningkatkan Partisipasi Politik dan oleh Kepala Utara dalam meningkatkan partisipasi memilih di desa tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data .

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis “*Field Research*”, ialah penelitian yang bermaksud mengkaji

¹² Nita Puspita, Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa), (Skripsi Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah

secara sungguh-sungguh dalam mendalami mengenai latarbelakang, kondisi saat ini, hubungan lingkungan suatu group sosial, perseorangan dan lembaga serta masyarakat.¹³ adapun fokus penelitian pada fenomena Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu Penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (Diskripsi) mengenai Situasi-Situasi atau Kejadian. Penelitian ini mencandra mengenai situasi atau Kejadian-Kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga memperoleh gambaran yang jelas.¹⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya tentang Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

c) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. fenomenologi berupaya mengungkap dan memahami realitas penelitian yang didasarkan

¹³ Kholid Nabuko Dan H. Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung, Tarsito, 1995), 98.

pada persepektif subyek penelitian. pendekatan penelitian fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dan memperoleh jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dalam proposal ini. dalam hal ini, peneliti melakukan pendekatan dengan melakukan pendekatan terhadap sumber informasi yang diyakini mengetahui tentang fenomena Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Informan dan Tempat Penelitian

a) Informan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian non numerik berangkat dari kasus-kasus tertentu, menurut model Spardley "*social situation*". terdiri dari tiga unsur yaitu aktor atau pelaku, tempat, dan aktivitas. Yang dimaksud situasi sosial adalah sebagai objek dari sebuah penelitian dicari dan dipahami secara mendalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristiknya memiliki ciri-ciri akan diduga atau keadaan tertentu yang akan diteliti.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif merupakan partisipan (narasumber), atau pun yang sering disebut key informan, orang yang tahu dengan jelas suatu informasi yang peneliti akan teliti untuk penelitiannya. Hendarsono mengemukakan informan memiliki tiga jenis yaitu:

1. Informan kunci (key informan), yaitu orang yang dapat mengetahui dan memiliki sejuta informasi pokok yang diperlukan untuk penelitian.

¹⁵Sandu Siyoto and Muhammad Ali, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, Ed. by Ayup, Literasi Media, 1st Edn (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).63.

2. Informan utama adalah mereka yang terlibat didalam penelitian secara langsung dalam segala interaksi sosial.
3. Informan Tambahan adalah orang-orang yang memberikan informasi tidak langsung, tetapi terlibat didalam suatu permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu dari serangkaian uraian diatas penelitian telah melakukan batasan informan penelitian yang akan dijadikan narasumber, yang mana terdiri dari 20 orang diantaranya :

1. Informan utama yaitu Masyarakat (Rohaya, Surmiyati)
2. Informan tambahan yaitu Organisasi Kepala Utara Dan Anggota Dan Pengurus (Ampera wati, Amelia, Anggraina,
3. Partisipan yaitu KPU Kabupaten, LSM

3. Sumber Data

a) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data atau yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari subyek (orang) secara individual atau kelompok, data primer meliputi; catatan hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, serta data-data yang diperoleh melalui informan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, berasal dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder umumnya meliputi; laporan, catatan yang telah digabungkan menjadi arsip, bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Data-data yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 296

diperoleh yaitu data primer dan sekunder kemudian digabungkan maka data-data tersebut akan memberikan data yang berdasar dan valid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.¹⁷ Dalam hal ini, pastinya peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung kegiatan meningkatkan partisipasi Politik yang ada di lapangan. Penelitian menggunakan observasi Non partisipan yang mana observasi dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Macam-macam observasi yaitu diantaranya, Observasi Partisipan, Observasi Non Partisipan dan Observasi Kuasi Partisipasi, dengan itu Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Metode ini digunakan untuk menggali data terkait Meningkatkan partisipasi politik perempuan

¹⁷Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), 98.

dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹⁸ Metode interview ini merupakan metode yang utama yang penulis gunakan dalam pengumpulan data. Dalam wawancara, (peneliti dapat melakukan *face to face interview* wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, 20 orang partisipan. Wawancara-wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam pelaksanaan interview menggunakan interview bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada interviewer. Jadi yang dimaksud adalah pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada persoalan. Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.¹⁹ Interview yang peneliti lakukan kepada Masyarakat yang tergabung di Kepal Utara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data tentang mengamati Pemberdayaan Politik. Data ini dibutuhkan guna melengkapi data lapangan yang peneliti dapatkan, maka penulis melengkapinya dengan metode dokumentasi yang berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam memperoleh suatu data pada Kepal Utara baik itu seperti Sejarah, Visi Misi dan Program Kegiatan.

¹⁸ Marzuki, Metodologi Riset..., 66.

¹⁹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian..., 67.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.²⁰ Menurut Mileas dan Hubernman sebagaimana dikutip oleh Emzir mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Emzir mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

b. Dislpay Data

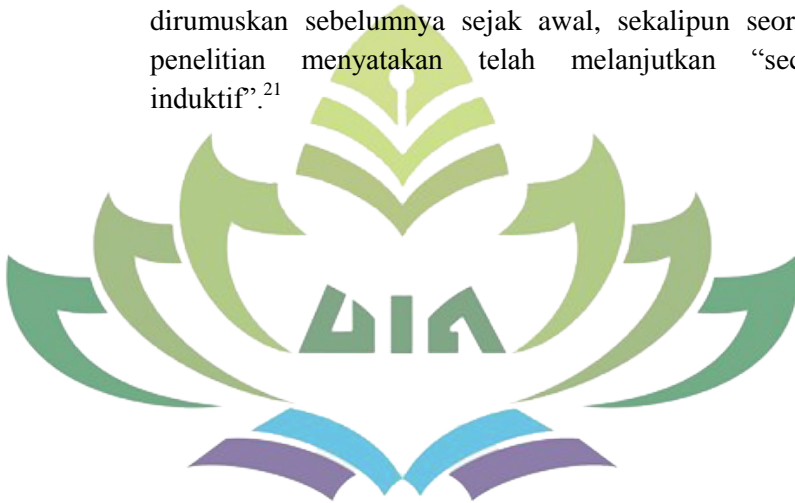
Selepas melakukan reduksi data, tahap berikutnya yaitu melakukan diplay data. dengan melakukan display data maka mempermudah mengerti yang terjadi dan merencanakan kegiatan berikutnya berdasarkan pada yang sudah dipahami. dalam penelitian kualitatif, display data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat., bagan, relasi antar kategori , Flowchart dan sejenisnya. Dalam tahap ini, penyajian data disajikan dalam bentuk urian naratif agar penulis mudah memahami fenomena yang terjadi. pada tahap ini, penulis berupaya menyajikan data yang relevn sehingga informasi yang diperoleh Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dapat

²⁰Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 85.

disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

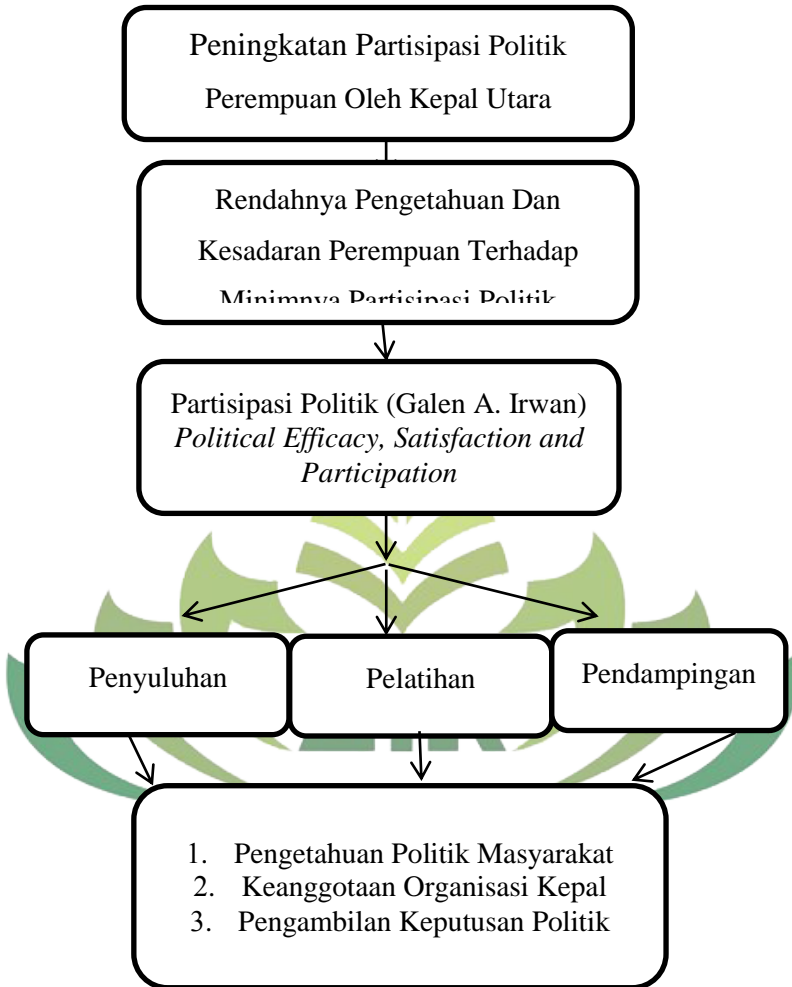
c. Kesimpulan Dan Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.²¹



²¹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)...., 195.

I. Kerangka Pikir



GAMBAR 1.1 KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sentesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.²² Berdasarkan kerangka pikir yang dapat dijelaskan Berangkat dari pemberdayaan yang akan dilihat terkait dengan

²²Dalman, Menulis Karya Ilmiah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 184.

langkah-lakah yang dilakukan oleh Kepala Utara untuk pemberdayaan politik yang dilakukan yaitu melalui penyuluhan sebagai media menjadikan dirinya berdaya dan mandiri serta paham terhadap hak-hak mereka untuk menyalurkan suara, menentukan calon pemimpin. dalam hal ni, permasalahan yang terjadi bahwa partisipasi politik perempuan saat ini Rendah, maka dengan itu perlu adanya inisiatif dari Kepala Utara, sehingga masyarakat tersebut partisipasi politiknya dapat meningkat. secara garis besar ketiga variable tersebut dapat dirumuskan diatas.

J. Kerangka Teoritik

1. Partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, Huntington dan Nelson pun menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan politik untuk mempengaruhi kepentingan mereka yang mengangkut hajat hidup orang banyak yang disebut *lobbying*, berperan sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, mencari koneksi untuk para pejabat pemerintah dan biasanya bermanfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang serta terlibat dalam tindak kekerasan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik manusia maupun benda.²³
2. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik diungkapkan oleh Milbrath, yaitu: pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal

²³Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 4.

maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dll; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik.²⁴ Lain halnya dengan Frank Lindenfeld yang mengatakan bahwa kepuasan finansial adalah faktor utama seseorang berpartisipasi politik. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi. Dan Nimmo menambahkan bahwa seseorang berpartisipasi dalam politik dipengaruhi oleh adanya peluang resmi dimana seseorang berpartisipasi politik karena didukung oleh kebijakan negara, kemudian adanya sumber daya sosial serta adanya motivasi personal atau kemauan diri sendiri untuk terlibat dalam dunia politik.²⁵

3. Tingkat partisipasi politik di setiap negara atau daerah bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya.²⁶ Dalam masyarakat yang kompleks dan lebih kaya, dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi serta sosio-ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terlibat dalam politik dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berkembang dan primitif. Tingkat partisipasi politik juga ditentukan oleh kesadaran politik setiap anggota

²⁴Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156-157.

²⁵ Dan Nimmo Dikutip Oleh Zaenal Mukarom. *Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, Nomor 9, (2008): 260
[Http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/68](http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/68).

²⁶Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), 5.

masyarakat. Semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka ia akan semakin menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, seseorang tidak menaruh perhatian pada politik disebabkan oleh kesadarannya bahwa pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara kurang memberi apresiasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih fokus kepada salah satu kelompok yang membawa keuntungan bagi kepentingan mereka.²⁷

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan Proposal skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseruan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang : Partisipasi Politik Pengertian Partisipasi Politik, Tujuan Partisipasi Politik, Tingkatan Partisipasi Politik, Faktor Penyebab Partisipasi Politik, Politik Perempuan, Pengertian Politik Perempuan, Posisi

²⁷ Gabriel A. Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan Dan Partisipasi Politik", Dalam Perbandingan Sistem Politik, Peny. Mochtar Mas'ood Dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 61.

Perempuan dalam UUD, Perempuan dan Politik Dalam Islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian tentang Gambaran Umum Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kegal Utara), Sejarah Berdirinya Kegal Utara, Tujuan Kegal Utara, Fungsi Kegal Utara, Struktur Kepengurusan Kegal Utara, Peningkatan Partisipasi Politik, Tahap Penyuluhan, dan Pelatihan.

BAB IV ANALISIS DATA

Berisi tentang Analisis Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Dalam analisis politik, modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara Negara berkembang. Pada awal nya studi mengenal partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembang nya demokrasi banyak nya muncul kelompok kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok ini lahir di masa pasca industrial dan dinamakan gerakan social baru. Kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.²⁸ Selanjutnya, Huntington dan Nelson pun menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan politik untuk mempengaruhi kepentingan mereka yang mengangkut hajat hidup orang banyak yang disebut lobbying, berperan sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, mencari koneksi untuk para pejabat pemerintah dan biasanya bermanfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang serta terlibat dalam tindak kekerasan

²⁸ Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 4.

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik manusia maupun benda

Hal senada dijelaskan oleh Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.²⁹

Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dsb.

Huntington dan Nelson kemudian membagi landasan atau asal usul seseorang atau kelompok melakukan kegiatan partisipasi politik (terkecuali dalam bentuk mencari koneksi), yaitu³⁰

- a. Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan yang sama.
- b. Kelompok: individu-individu dengan ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan: individu-individu yang tempat tinggalnya sama atau berdekatan.

²⁹Miriam Budiardjo Dikutip Oleh Merphin Panjaitan. Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2011), 73.

³⁰ *Hubungan Patron-Client Adalah Hubungan Pertukaran Peran Yaitu Kelompok Masyarakat Dengan Tingkat Sosio-Ekonominya Tinggi (Patron) Berusaha Mempengaruhi Dan Melindungi Kelompok Yang Tingkat Sosioekonominya Rendah (Client). Sebagai Gantinya, Maka Kelompok C.*

- d. Partai: individu-individu yang tergabung dalam organisasi formal yang sama dan berusaha untuk mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- e. Golongan: individu-individu dengan status, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat namun dipersatukan oleh interaksi secara terus menerus dan membentuk hubungan patron client.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik diungkapkan oleh Milbrath, yaitu: pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dll; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik.³¹ Lain halnya dengan Frank Lindenfeld yang mengatakan bahwa kepuasan finansial adalah faktor utama seseorang berpartisipasi politik. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.³² Dan Nimmo menambahkan bahwa seseorang berpartisipasi dalam politik dipengaruhi oleh adanya peluang resmi dimana seseorang berpartisipasi politik karena didukung oleh kebijakan negara, kemudian adanya sumber daya sosial serta adanya motivasi personal atau kemauan diri sendiri untuk terlibat dalam dunia politik.³³

³¹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156-157.

³² *Ibid.*, 156.

³³ Dan Nimmo Dikutip Oleh Zaenal Mukarom. *Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, Nomor 9, (2008): 260.
[Http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/681](http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/681)

Tingkat partisipasi politik di setiap negara atau daerah bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya. Dalam masyarakat yang kompleks dan lebih kaya, dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi serta sosio-ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terlibat dalam politik dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berkembang dan primitif. Tingkat partisipasi politik juga ditentukan oleh kesadaran politik setiap anggota masyarakat.

Semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka ia akan semakin menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, seseorang tidak menaruh perhatian pada politik disebabkan oleh kesadarannya bahwa pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara kurang memberi apresiasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih fokus kepada salah satu kelompok yang membawa keuntungan bagi kepentingan mereka.

Galen A. Irwan dalam tulisannya mengenai "Political Efficacy, Satisfaction and Participation" menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu, perasaan puas menentukan tingkat partisipasi.³⁴ Kesimpulan Galen ini dapat berlangsung dalam suatu masyarakat karena pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam politik menaruh harapan bahwa kebutuhan dan aspirasinya akan diperhatikan oleh para pemimpin dan perbuatan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi kebaikan bersama. Selain itu, Gabriel A. Almond juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosio-ekonomi serta partai politik tentunya mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik.

2. Faktor Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. menyebutkan dua variable

³⁴Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), 5.

penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud. dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.³⁵

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik.

Selanjutnya Faktor partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti Yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- c. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

³⁵ Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1981), 371.

³⁶ Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156-157.

- d. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan

kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

3 Tipologi Partisipasi Politik

secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:³⁷

- a. partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum
- c. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat
- d. Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

³⁷ Seperti disebut oleh Rod Hague at al., Comparative Government and Politics, 91

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhataian dari berbagai kalangan.

4. Bentuk Partisipasi Politik

merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal , dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentukbentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Ada dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1. Partisipasi politik konvensional
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik

- c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative
2. Partisipasi politik nonkonvensional
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok
 - e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dana atau sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Tujuan Dan Fungsi Pemilu

a. Tujuan Pemilu

Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Fungsi Pemilu

Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

3. Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan

Dalam risetnya, Pusat Kajian Politik FISIP UI menemukan beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan dalam melaksanakan partisipasinya menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

- a. Permasalahan budaya yang sering kali menganggap perempuan tidak dapat mengambil keputusannya sendiri karena dalam banyak hal perempuan harus meminta ijin/persetujuan laki-laki sebagai pasangan atau orang tuanya. Maka dari itu perempuan dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam ranah politik dan pemerintahan, berakar dari budaya patriarki di masyarakat, perempuan dipandang tidak pantas dipilih dalam jabatan tertentu, karena politik dan pemerintahan lebih lekat dengan dunia laki-laki. Dari budaya tersebut, laki-laki cenderung ditempatkan pada posisi-posisi di luar rumah (publik), sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi-posisi domestik. Konstruksi pemikiran seperti inilah yang muncul karena adanya stereotype gender. Sehingga menimbulkan keyakinan mengenai perilaku yang tepat untuk dilaksanakan perempuan atau laki-laki. Stereotype yang negatif bagi perempuan kemudian menjadi penghalang untuk memegang kepemimpinan.³⁸
- b. Kurangnya pengetahuan perihal kepemiluan. Seleksi anggota KPU RI mensyaratkan calon peserta memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemilu sesuai kerangka Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Pengetahuan ini kemudian diuji dalam bentuk tes tertulis. Gagalnya peserta perempuan dalam seleksi terutama pada tahap tertulis ini mengindikasikan kurangnya

³⁸Rike Anggun Artisa, Perempuan Dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi Diy, Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No.1 (2014): 12.

pengetahuan dan juga pengalaman yang bersangkutan atas segala hal yang berkaitan dengan pemilu.

- c. Masalah geografis juga menjadi salah satu hambatan keikutsertaan perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang antara dua ujungnya yakni Sabang dan Merauke jika ditarik garis imajiner berjarak 5.245 kilometer. Perempuan Indonesia dari wilayah manapun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi di segala bidang, khususnya sebagai anggota KPU RI. Akan tetapi pelaksanaan seleksi pada tahap tes tertulis dan wawancara terpusat di Jakarta. Jika calon peserta berdomisili di luar Jakarta, atau bahkan di luar pulau, maka biaya akomodasi menjadi salah satu pertimbangan yang acap kali menjadi kendala bagi calon peserta.

Negara telah secara formal mengatur keterlibatan perempuan khususnya pada Lembaga penyelenggara pemilu dalam undang-undang melalui tindakan afirmatif. Sehingga seharusnya keikutsertaan perempuan terbuka secara bebas. Namun demikian terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam keikutsertaan perempuan. Diperlukan upaya-upaya penguatan untuk mendukung agar keterwakilan perempuan dengan kuota 30% dapat terpenuhi secara maksimal. Hal-hal yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam menjalani proses seleksi sebagai anggota KPU RI dapat diminimalisir dengan berbagai upaya.

Pertama, perlu menguatkan kembali kesadaran semua pihak terhadap kesetaraan gender. Sering dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang mendapat pengaruh dari relasi sosial budaya dan struktur masyarakat akan karakter, fungsi, tanggung jawab, status dan peran antara perempuan dan laki-laki. Gender sebagai konstruksi sosial budaya dapat berbeda antar kelompok berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipungkiri antara perempuan dengan laki-laki.

Perbedaan antara konstruksi biologis dan sosial laki-laki dengan perempuan adalah dua pokok pikiran penting yang menjadi dasar keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang. Pada masyarakat yang berbudaya patriarki, perempuan sering menjadi nomor dua dalam bidang sosial, Pendidikan, politik, bahkan pemerintahan. Tampilnya perempuan dalam bidang pemerintahan, khususnya lembaga penyelenggara pemilu menjadikan perempuan sebagai salah satu pembuat kebijakan (policy maker). Peranan ini akan berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dalam kehidupan bernegara. Diharapkan dengan adanya perempuan sebagai salah satu pembuat kebijakan maka dapat mewakili kepentingan sesama perempuan sendiri. Karena dengan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, laki-laki tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan perempuan³⁹

Kedua, rendahnya tingkat keterwakilan perempuan pada Lembaga KPU RI diawali dari rendahnya tingkat kelulusan calon anggota perempuan pada tahap seleksi. Seleksi calon anggota KPU RI diselenggarakan dalam tahapan penjarangan dan penyaringan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan hingga penetapan calon anggota. Pada tiap tahapan ini calon anggota yang akan mendaftar seleksi dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam hal penyelenggaraan pemilu, tata negara dan tentang kepartaian, sebagai persyaratannya. Selain itu calon anggota juga dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria pendidikan minimal sarjana (S1). Persyaratan-persyaratan ini yang kemudian menjadi standar bahwa calon anggota KPU RI harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang tidak berbeda. Karena jabatan yang akan diemban dalam penyelenggaraan pemilu menuntut hal tersebut. Pengetahuan tidak hanya bisa didapat dari bangku Pendidikan formal saja. Seorang perempuan dengan latar belakang yang jauh dari dunia politik dan pemerintahan pun dapat mempelajari pengetahuan tersebut apabila tersedia akses untuk mendapatkan Pendidikan

³⁹ Rasyidin Dan Fidhia Aruni, *Gender Dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 56.

politik, ketatanegaraan, maupun pemilihan. Adalah tanggung jawab pemerintah, partai, maupun lembaga sosial kemasyarakatan untuk menyediakan akses tersebut. Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, yang dapat diwujudkan melalui sosialisasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang pemilihan, maupun penguatan kapasitas perempuan. Yang tidak kalah penting juga adalah peran media massa yang mengajak masyarakat untuk mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Sehingga media massa memiliki peran dalam mendidik masyarakat terutama perempuan untuk memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta sadar akan haknya dalam berpartisipasi di bidang politik.⁴⁰

Selain itu upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam bidang pemilihan juga dapat didukung dari keterlibatan pada penyelenggaraan pemilu. Pengalaman untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di level terkecil, misalnya menjadi anggota panitia pemilihan tingkat kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, atau bahkan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dapat menjadi nilai tambah dalam memenuhi persyaratan menjadi calon anggota KPU RI. Disamping itu partisipasi perempuan secara penuh dalam politik khususnya pemilu tidak dibebankan pada lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu saja, namun juga harus ada kemauan dari perempuan itu sendiri untuk melibatkan diri secara aktif⁴¹

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi atas masalah geografis yang menghambat keikutsertaan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Saat ini, khususnya pasca pandemi Covid-19, masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan gawai dan perangkat elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui aplikasi layanan konferensi secara digital. Seharusnya perkembangan teknologi ini

⁴⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), 327.

⁴¹ Yon Daryono Dkk, *Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019*, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1 (2020): 73.

dapat dimanfaatkan untuk menjaring partisipasi perempuan menjadi lebih luas. Tim seleksi anggota KPU RI misalnya, dalam mengadakan tes wawancara, dapat menggunakan aplikasi komunikasi untuk mewawancarai calon anggota yang berdomisili di luar pulau Jawa. Begitu pula dengan tahap tes tertulis, tim seleksi dapat menyelenggarakan tes berbasis komputer di tiap-tiap ibukota provinsi. Sehingga setiap calon yang mengalami kesulitan akomodasi tetap bisa mendapatkan haknya dalam mengikuti seleksi karena penyelenggaraan seleksi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja.

4. Posisi Perempuan Dalam Pemilu

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif-terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009.⁴²

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.⁴³

Persaingan politik dipercaya akan meningkatkan inovasi politik di antara pihak-pihak yang berkompetisi. Persaingan tidak hanya pertarungan antar calon legislatif akan tetapi membangun temuan ataupun perbaikan atas isu-isu dan program kerja politik yang disesuaikan dengan setiap perubahan yang ada di masyarakat. Tidak adanya persaingan politik akan muncul anggapan bahwa yang dimiliki dan yang

⁴²Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPRRI. Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel RUU Pemilu Peluang Untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.

⁴³Widdy Yuspita Widiyaningrum, Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 Nomor 2, Juli 2020.

dilakukan sudah benar adanya. Hal ini tentu akan menurunkan kualitas iklim politik Indonesia. Berlawanan dengan itu dalam iklim persaingan mau tidak mau masing-masing pihak akan berlomba terus memperbaiki diri. Mereka sadar bahwa siapapun yang mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterima masyarakat pastilah akan meninggalkan basis legitimasi mereka di mata masyarakat. Perempuan Perlemen telah berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui kegiatan-kegiatan perempuan di beberapa sektor kehidupan sosialnya dengan harapan agar partisipasi perempuan di bursa calon anggota legislatif dapat meningkat. Namun kegiatan tersebut masih banyak menemui kendala-kendala sosial, budaya, ekonomi dan politik, sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan tidak terlalu signifikan dengan peningkatan jumlah perempuan yang dapat masuk sebagai anggota legislative.⁴⁴

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi),⁴⁵ jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

⁴⁴ Gesit Yudha Puji Arsono, *Persaingan Politik Perempuan Pada Pemilihan Umum 2024 Di Lampung (Studi Terpilihnya Asmara Dewi, Eva Dwiyana, Dan Dwie Aroem Hadiatie Sebagai Anggota Legislatif)*, (Universitas Lampung, 2015).

⁴⁵ Rizki Priandi, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.⁴⁶

C. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga Negara.⁴⁷ Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization*, *political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik.

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan

⁴⁶Hariyanti, Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol Vol. 15. No. 1 Tahun 2018.

⁴⁷Eko Handoyo Dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 9.

terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.⁴⁸

Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*.⁴⁹ Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.⁵⁰

⁴⁸Prabowo, *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), 4-5.

⁴⁹Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 13..

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik.

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Khoiron, juga menjelaskan tujuan pendidikan politik. Pertama, ia menjelaskan bahwa pendidikan politik mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil. Kedua, memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi demokrasi serta konstitusi Indonesia maupun negara-negara barat. Ketiga, menyemaikan komitmen yang rasional atas prinsip-prinsip dan nilai fundamental sebagaimana dituangkan dalam dokumen inti dan keempat, mempromosikan pengertian tentang peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia.⁵¹

Dari penjelasan poin di atas, partai politik memiliki peran yang penting dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat juga kader partai tentang pentingnya politik. Karena, partai merupakan sebuah organisasi yang bisa berinteraksi ke masyarakat dan kadernya secara langsung. Inti dari tujuan utama dari pendidikan politik yaitu, pendidikan politik ingin menunjukkan bahwa politik dan juga isu-isunya bukan hanya sebuah pembelajaran bagi para elit politik atau mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Politik merupakan salah satu wadah pembelajaran bagi warga negara, sehingga dengan

⁵¹ Eko Handoyo Dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 16.

adanya pendidikan politik warga negara dapat melakukan aktivitas politik secara benar sesuai dengan asas negara tersebut.⁵²

Partai politik merupakan salah satu organisasi yang mempunyai peran dalam pendidikan politik di masyarakat. Karena, partai selalu mempengaruhi masyarakat dalam sebuah keputusan. Partai politik nantinya mendoktrin masyarakat agar mereka berpihak ke salah satu partai tersebut. Hanya saja, pendidikan yang diajarkan oleh partai politik berbeda-beda tetapi mempunyai inti yang sama yang mendapatkan simpati dari masyarakat. Akan tetapi jika masyarakat mengetahui tujuan pendidikan politik yang sebenarnya, masyarakat tidak akan tergiur oleh apa yang telah diberikan oleh partai tersebut. Mereka akan menyikapinya dengan kritis, memahami situasi dan tentunya mereka berhak meminta/menuntut untuk aksi nyata dari partai politik tersebut.

3. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya (*political culture*) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992):

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem

⁵² Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), 11.

politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena).⁵³

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi

⁵³M. Rush, *Politics And Society: An Introduction to Political Sociology* (Hemel: Hempstead Harvest Wheatsheep, 1992), 92.

nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik.

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

D. Organisasi

1. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis.⁵⁴ Di luar negeri, Ormas sering disebut sebagai Civil Assosiation atau Organisasi Masyarakat Sipil. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan istilah Ormas.

Dalam perspektif sosiologis, ada tiga ranah kehidupan masyarakat yang saling berkesinambungan, yaitu negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur rakyat melalui peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kedaulatan kekuasaannya berasal dari rakyat. Pasar adalah interaksi penggerak ekonomi masyarakat, dimana dalam hal ini terjadi proses transfer, produksi, distribusi, serta konsumsi. Sedangkan masyarakat sipil merupakan ranah kehidupan sosial di luar negara dan pasar. Dimana dalam masyarakat sipil terjadi interaksi-interaksi antar manusia yang akhirnya berkumpul dan memperjuangkan suatu tujuan gunan

⁵⁴M. Najib Ibrahim, "Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)", Tesis Ilmu Hukum, Progam Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.

memenuhi kebutuhan bersama.⁵⁵ Dari kehidupan masyarakat sipil inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya asosiasi masyarakat sipil berbentuk ormas. Saat ini masih belum ada pengertian yang pasti terkait ormas, masih belum mendapatkan pengertian yang pasti.

Adapun beberapa pengertian terkait ormas, antara lain:

Pengertian Ormas adalah suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat, dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan masa lainnya.⁵⁶ Sedangkan di Indonesia, pengertian ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵⁷

2. Organisasi Keagamaan

Organisasi adalah kesatuan orang-orang yang dikoordinasi oleh pemimpin, yang memiliki nilai dan norma tertentu, yang berfungsi mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan sistem terbuka, yang terdiri dari banyak unsur yang saling berhubungan, konflik untuk perubahan dan perkembangan.

Menurut A. Heryana organisasi adalah system dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan suatu dengan yang lain.⁵⁸ Sedangkan pengertian organisasi menurut Thoha merupakan suatu kerangka hubungan yang

⁵⁵Ridaya Laodengkowe, *Mengatur Masyarakat Sipil*, (Depok: Pustaka, 2010), 12.

⁵⁶Arhi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 35.

⁵⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁵⁸ Ade Heryana, *Organisasi dan Teori Organisasi*, (Tangerang: Ade Heryana Institute, 2020). 3

berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi. Organisasi adalah kerangka kerja bagi manajemen dalam bekerja. Artinya, organisasi merupakan wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Organisasi semacam peta jalan (road-map) bagi manajemen dan anggotanya untuk mencapai tujuan.⁵⁹

Sebuah organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai suatu tujuan
- b. Sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk perilaku dan budaya organisasi
- c. Sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri

Tiga pokok teori diatas, Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya dapat membentuk struktur yang mampu menunjang pencapaian tujuannya. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terdapat terkendali terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efektif dan efisien. Pada umumnya terdapat empat bentuk organisasi yaitu:

- a. Organisasi Kerohanian (religi dan agama), tujuannya membina moral
- b. Organisasi Bisnis, tujuannya mencari keuntungan
- c. Organisasi Massa, tujuannya memperbaiki kehidupan ekonomi

⁵⁹ Ade Heryana, Organisasi Dan Teori Organisasi, (Tangerang: Ade Heryana Institute, 2020). 3..

d. Organisasi Politik, tujuannya merebut kekuasaan negara⁶⁰

Selanjutnya kata agama dalam ilmu perbandingan agama mengandung pengertian universal. Artinya, agama tersebut tidak ditujukan kepada salah satu agama yang diyakini oleh sekelompok orang, seperti Yahudi, Majusi, Islam, Kristen saja, melainkan semua agama yang ada di dunia ini, baik lokal, nasional, multi nasional yang masih ada dan diyakini oleh manusia primitif maupun masyarakat modern.

Agama dalam encyclopedia of philosophy adalah kepercayaan kepada tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan khendak ilahi yang mengatur alam semesta dan moral dengan umat manusia.⁶¹

Dalam bahasa Arab agama berasal dari kata ad-din, dalam bahasa latin, yaitu dari kata religi, dalam bahasa Inggris dari kata religion. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah relegare yang mengandung arti mengumpulkan, membaca, dan mengikat.⁶²

Secara Terminologi organisasi keagamaan adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama. Organisasi keagamaan merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam suatu agama. munculnya organisasi keagamaan ini menjadi wadah dalam berfikir dan memiliki kepentingan untuk menguatkan pemahaman agamanya. Sehingga setiap orang didalamnya dapat mengekspersikan karakter yang diperankanya dan menambah eksistensi organisasinya.

⁶⁰ Hafizur Rahman, Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah Dalam Modernisasi Ekonomi Masyarakat Islam Di Kota Pekanbaru (Tahun 2017), Jurnal: JOM FISIP Vol.4, No.2 Oktober 2017. 7.

⁶¹ Dra. Rohmalia Wahab, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 21.

⁶² Yatimin Abdulah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Amzah, 2006). 2.

Perkembangan organisasi keagamaan di Indonesia track record yang cukup panjang. Pada awal zaman sebelum kemerdekaan sampai psaca orde baru di kepemimpinan B.J. Habibie. Bahkan sampai saat ini organisasi keagamaan masih eksis dengan karakter dan cirikhasnya masin-masing. Tidak jarang ada yang mengalami perubahan-perubahan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Organisasi keagamaan juga bisa dikenal dengan sebagai gerakan keagamaan, yang didefinisikan oleh Nottingham sebagai usaha terorganisir untuk menyebarkan agama baru atau interpretasi baru yang sudah ada.

Organisasi keagamaan di Indonesia merupakan fenomena yang sangat unik untuk dikaji. Penulis mencatat beberapa organisasi keagamaan yang ada di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) dan lain-lain. Mengingat bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang cukup besar, ditambah latar belakang masyarakat yang heterogen. Banyaknya agama di Indonesia memunculkan adanya organisasi-organisasi keagamaan, baik yang memiliki skala lokal maupun nasional.

3.Organisasi Sosial

Dua sisi kemanusiaan yang melekat pada setiap individu yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sering didefinisikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai arti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, itu artinya tidak bisa hidup sendiri. Dengan dasar kodrati yang demikian berarti manusia dilahirkan untuk menjadi bagian dari kebulatan suatu masyarakat. Dengan demikian bahwa manusia merupakan bagian dari organisasi sosial.

Manusia sejak dilahirkan mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu; 1) keinginan untuk menjadi satu dengan

manusia lain disekelilingnya yaitu masyarakat dan 2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya (Hari Budiyanto, dkk. 2008: 8). Manusia untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya.

Organisasi sosial (sosial organization) didalam kehidupan manusia tersebut, merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu pertanyaan, apakah setiap himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial? untuk itu, diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain; 1) adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, 2) adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, 3) adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku, 5) bersistem dan berproses.

Istilah organisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam masyarakat. Organisasi sosial yang merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan.

Organisasi sosial adalah dimana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor, yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok kelompok itu, sehingga hubungan antara

mereka bertambah erat. Faktor-faktor itu yang terdiri dari kepentingan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu.

Organisasi sosial dalam arti sebagai sebuah asosiasi adalah sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu, kepentingan tertentu, menyelenggarakan kegemaran tertentu atau minat-minat tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto organisasi sosial adalah kesatuankesatuan hidup atas dasar kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap sebagai sebuah asosiasi. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sosial berdasarkan pendekatan sosiologi adalah organisasi sosial sebagai sebuah asosiasi, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai tujuan, kepentingan, kegemaran, minat yang sama dan membentuk sebuah organisasi yang tetap.

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan atau organisasi massa (ormas) Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bab I (1), yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi sosial dalam prosesnya, terdapat proses yang dinamis, dimana hubungan antar manusia didalamnya senantiasa berubah-ubah, tindakan masing-masing orang terhadap orang lain selalu berulang-ulang dan terkoordinasi. Namun demikian dalam organisasi sosial mencerminkan pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi organisasi sosial, disamping sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis, juga sebagai kondisi yang bersifat structural.

Organisasi sosial anggota-anggotanya tersusun secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peranan yang bersifat formal, masing-masing memelihara dan berusaha bersama

untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai perannya tersendiri dalam kaitannya untuk mencapai tujuannya. Dapat diketahui sebelumnya bahwa peran menurut Ayu Wulandari adalah adanya sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang atau kelompok berdasarkan posisinya di masyarakat. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari organisasi sosial adalah:

- a. Rumusan batas-batas operasionalnya (organisasi) jelas, organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.
- b. Memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan lain sebagainya.
- c. Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.
- d. Adanya norma atau aturan yang mengikat hubungan antar individu



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepal Utara

1. Sejarah Kepal Utara

Kesatuan Perempuan Lampung Utara memiliki sejarah awal mula berdirinya Kepal Utara ini, dengan adanya masalah-masalah yang muncul terhadap para perempuan sehingga muncul keinginan dan semangat untuk bangkit bersama, menuntut hak-hak para perempuan dalam berbagai bidang baik kesehatan, pendidikan, hukum dan politik. Oleh karena itu, mengenai sejarah kepal utara yang sangat beragam dan menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki Kepal Utara.⁶³

Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara) berada di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara adalah salah satu yang bergerak melakukan banyak aktivitas pemberdayaan untuk masyarakat khusus perempuan, dengan melakukan pemberdayaan di bidang politik yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran politik.

Negara demokrasi melibatkan masyarakat dalam suatu perencanaan maupun dalam partisipasi politik, aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara. Partisipasi politik warga dalam pemilu, khususnya dalam pemberian suara (voting) sangat mutlak dibutuhkan. Namun kenyataannya masyarakat belum menunjukkan tingkat partisipasi dalam pemilu dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi itu belum begitu ideal dan masyarakat dalam memilih calon wakil-wakilnya yang akan mereka pilih itu tidak di dasarkan oleh pengetahuan yang baik. Dengan demikian mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang siapa- siapa saja orang yang memimpin.

⁶³Sejarah Singkat." Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

1. Sejarah Kesatuan Perempuan Lampung Utara

Menurut Cerita dari ketua Kepal Utara Ibu Ampera Wati. Dasar pemikiran terbentuknya Kepal Utara, berawal dari berbagi cerita sesama perempuan yang merasa bahwa selama ini hanya menjadi objek baik dalam lingkungan keluarga, adat dan pemerintahan. Hal ini terjadi karena kentalnya budaya patriarki yang berakibat pada relasi yang tidak setara dan tidak adil, serta adanya diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi iri yang menjadi keprihatinan bagi kaum perempuan. Meratapi nasib tidak akan merubah apapun. Karena itu, perempuan harus melakukan sesuatu agar ada perubahan sosial. Diawali dengan pendidikan kritis bersama dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, tumbuh kesadaran bahwa perubahan harus dilakukan melalui pengorganisasian pemikiran dan mengkonsolidasi berbagai elemen kekuatan perempuan.⁶⁴

Berdasarkan pada semangat dan pengalaman social perempuan sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai manajer rumah tangga, sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat adat, dan sebagai warga bangsa, adalah merupakan asset yang tidak bisa diabaikan. Semangat dan pengalaman ini akan memberikan arti dan kontribusi dalam Keinginan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, Jika perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama.

Keinginan kuat untuk memperjuangkan hak dasar perempuan tersebut, diwujudkan dengan membuat organisasi "Kesatuan Perempuan Lampung Utara" disingkat Kepal Utara, pada 13 Mei 2010, di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi Kota. Dideklarasikan pada 25 November 2010, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang juga diperingati oleh masyarakat

⁶⁴Sejarah Singkat. " Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

internasional. Kepal Utara, disimbolkan dengan kepalan tangan dan siger. Kepalan tangan bermakna pada semangat dan kekuatan perempuan untuk menyelesaikan lima masalah utama, yaitu kesehatan, pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi. Siger merupakan lambang penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal Lampung.

Pada awal pembentukan Kepal Utara, bekerja di 3 Kecamatan (Kota Bumi Kota, Abung Timur, Kota Bumi Selatan), di 9 Desa/ kelurahan, dan beranggotakan 90 orang. Secara organisatoris, Kepal Utara merupakan bagian dari Gerakan Perempuan Lampung (GPL), yang mengelola organisasinya secara otonom. Kepal Utara di Kotabumi Lampung Utara adalah Organisasi yang hadir atas pertimbangan masyarakat khususnya perempuan untuk melakukan perubahan dan Kesadaran, bahwa perubahan harus dilakukan melalui pengorganisasian pemikiran mengkonsolidasi berbagai elemen kekuatan perempuan. Dan Kepal Utara ini melakukan pemberdayaan politik salah satunya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu agar perempuan bisa menggunakan hak nya dengan baik untuk menentukan calon pemimpin."⁶⁵

2. Visi Misi Kesatuan Perempuan Lampung Utara

Untuk mencapai tujuan bersama Kepal Utara mempunyai VISI dan MISI, diharapkan dengan adanya visi dan misi ini setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan yang jelas. Sesuai apa yang diharapkan dan disepakati oleh Kepal Utara yaitu:

1. Visi Kepal Utara adalah: Terwujudnya tatanan masyarakat yang adil baik bagi perempuan maupun laki-laki, melalui pemenuhan hak dasar perempuan, (hak atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik,

⁶⁵Sejarah Singkat." Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

dan perlindungan hukum) dengan memperhatikan budaya dan lokal yang adil gender.

2. Misi dari Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Kotabumi Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong lahirnya kebijakan untuk pemenuhan hak dasar, khususnya hak atas kesehatan perempuan dan anak, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal yang adil gender.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota melalui pendidikan-pendidikan kritis.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan mengembangkan ekonomi alternatif.
- 4) Meningkatkan pengelolaan organisasi berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi.⁶⁶

3. Tujuan Kesatuan Perempuan Lampung Utara

Berdasarkan penjelasan sejarah yang dikemukakan di atas, Kesatuan Perempuan Lampung Utara mempunyai tujuan sebagai dasar utama dalam melakukan penyadaran terhadap para perempuan mempunyai Tujuan sebagai pelaksanaan utama pemberdayaan di berbagai bidang salah satunya bidang politik. Adapun Tujuan dari Kesatuan Perempuan Lampung Utara tersebut adalah: Melakukan perubahan keadilan untuk semua baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁷

Pengetahuan dan kesadaran Perempuan, baik secara sadar atau tidak sadar bahwa seseorang masuk dalam golongan jenis kelamin. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikian gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita.

⁶⁶ Visi Misi, " Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

⁶⁷ Tujuan. " Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

Perbedaan secara anatomis dan psikologi menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan internasional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.⁶⁸

Politik perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kaum perempuan yang mempunyai kebijakan, kekuatan dan kemampuan pengambilan keputusan dibidang politik dalam meningkatkan partisipasi memilih di Kotabumi Selatan, Desa Tanjung Aman Lampung Utara. Peningkatan Politik Perempuan dapat diartikan memampukan perempuan menggunkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan bersosialisai sebesar apapun potensi tersebut.

Dalam membangun partisipasi politik, sehingga meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam memilih dengan cara memberikan pengetahuan politik atau membangun kesadaran politik. Berangkat dari strategi yang akan dilihat terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Utara untuk pemberdayaan politik yang dilakukan yaitu melalui penyuluhan sebagai media menjadikan dirinya berdaya dan mandiri serta paham terhadap hak-hak mereka untuk menyalurkan suara, menentukan calon pemimpin. Dimana Peningkatan Partisipasi politik yang dilakukan berupa penyuluhan, Diskusi-diskusi dengan masyarakat, khususnya perempuan yang dibina oleh Kepala Utara di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.

4. Fungsi Kesatuan Perempuan Lampung Utara

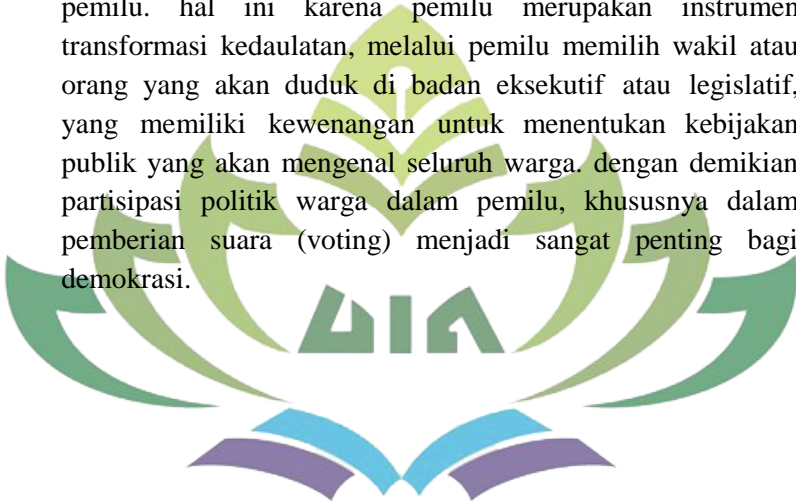
Dalam melaksanakan programnya Kepala Utara Mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai serikat perempuan untuk membangun gerakan bersama baik individu atau kelompok di Lampung Utara.
2. Sebagai penguatan kapasitas anggota melalui pengkaderan.

⁶⁸ Visi Misi, " Kesatuan Perempuan Lampung Utara", Dokumentasi, 15 Maret 2023

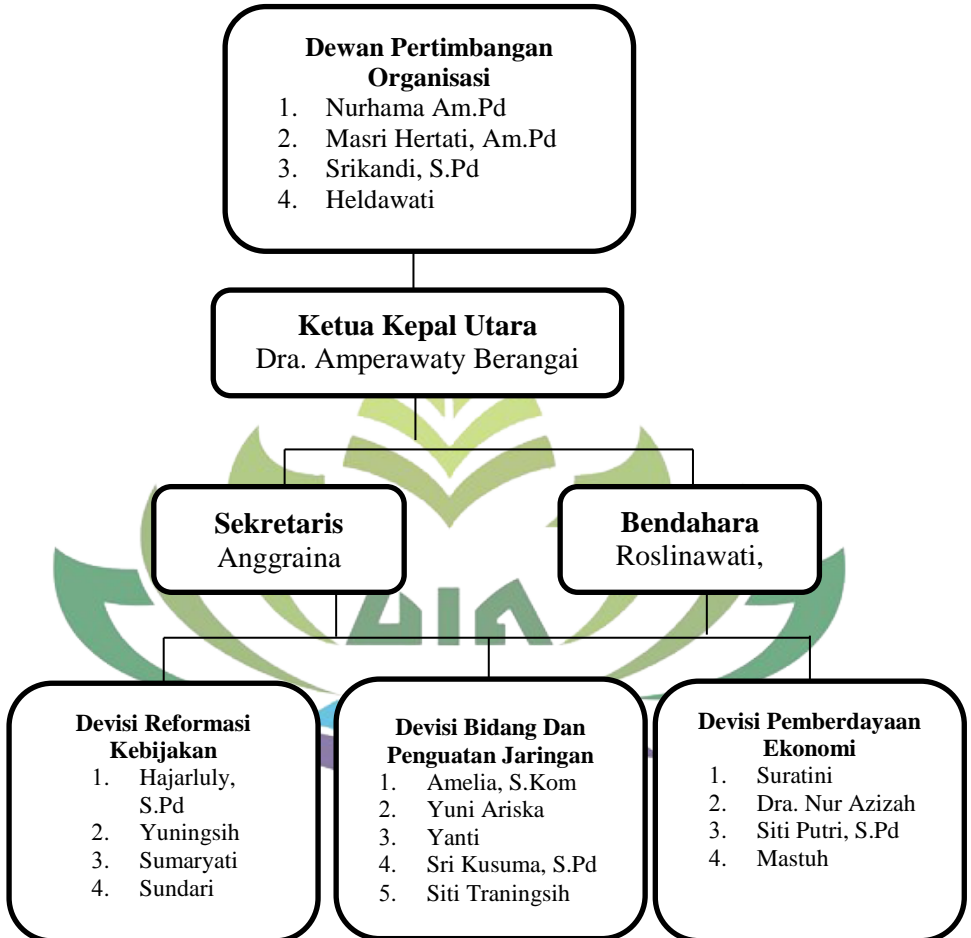
3. Sebagai mitra bagi gerakan sosial lain dalam membangun dan menguatkan gerakan.
4. Sebagai Organisasi yang melakukan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan ekonomi

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Logika yang dibangun adalah semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka akan semakin demokratis negara tersebut. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah partisipasi politik warga dalam pemilu. hal ini karena pemilu merupakan instrumen transformasi kedaulatan, melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang akan mengenal seluruh warga. dengan demikian partisipasi politik warga dalam pemilu, khususnya dalam pemberian suara (voting) menjadi sangat penting bagi demokrasi.



5. Struktur Kepengurusan Organisasi Kesatuan Perempuan Lampung Utara

Bagan 3.1
Struktur Kesatuan Perempuan Lampung Utara



Kegiatan Partisipasi politik yang dilakukan oleh Organisasi Kepala Utara dapat memberikan kontribusi bagi para perempuan di Kecamatan Kotabumi Selatan dalam mengarahkan masyarakat agar berdaya dan optimal dengan memberikan sosialisasi terkait pada pendidikan politik dan dapat memberikan pengetahuan tentang politik, sehingga tercapainya perempuan dalam mengembangkan wawasan politiknya.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya tidak ada larangan bagi wanita Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Dalam beberapa pasal yang terkait dengan persoalan hak asasi, tidak pernah ditemui perkataan yang membedakan jenis kelamin seseorang, tetapi istilah yang digunakan ialah warga negara. Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Begitu juga tentang persyaratan menjadi presiden, tidak pernah ada dicantumkan syarat yang membatasi hak wanita untuk menjadi pemimpin.

Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. Perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak mampu memimpin dan ikut campur dalam kebijakan, berpartisipasi, termasuk dalam berpolitik. Hal ini sejalan dengan hadirnya Budaya Patriarki memosisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuh, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambilan keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambilan kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Pada Sub Pembahasan ini dapat diuraikan mengenai temuan data di lapangan yang dihasilkan Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, ada beberapa hal yang peneliti temui di lapangan. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan partisipasi politik oleh Organisasi Kepal Utara, baik itu pertanyaan yang ditanyakan kepada ketua Organisasi Kepal Utara maupun ke kaum perempuan yang terlibat didalam Program Kegiatan Organisasi Kepal Utara yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam hal ini, peningkatan partisipasi politik yang dilakukan dengan melalui tahap kegiatan dalam Kegiatan pendidikan Politik, sehingga Kegiatan Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan kesadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidak-setaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang dilakukan. Namun pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita (ibu) dengan peran politiknya. Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas.

Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Politisi perempuan sangat diharapkan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik. Tetapi karena masih kurangnya jam terbang, basis pengalaman dan pendidikan politik yang kurang memadai, juga karena faktor sosial dan budaya. Secara sederhana dapat ditarik akar permasalahannya pada kurangnya pendidikan politik bagi perempuan. Untuk itu jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Pelaksanaan Kegiatan partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya, perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memnuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.

Kegiatan partisipasi politik perempuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh karena itu perlu dilandasi dengan peningkatan partisipasi politik demi berhasil nya suatu pencapaian yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara (Kesatuan Perempuan Lampung Utara). Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pendidikan politik karena didalam kegiatan sosialisasi juga terdapat pemberian bekal pengetahuan tentang pendidikan dalam berpolitik, seperti bagaimana mekanisme pemberian suara pada pemilihan umum, dan bagaimana juga mencegah adanya money politik dan belajar

juga untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan kemauan masyarakat, khususnya untuk para perempuan agar sesuai dengan hak pilih mereka, seperti halnya mempunyai hak untuk berpolitik, menyuarakan aspirasi untuk ikut berkontribusi dalam memilih pemimpin untuk kemajuan baik itu untuk Negara maupun untuk masing-masing daerah.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori partisipasi politik dalam mengatasi permasalahan politik perempuan, Partisipasi politik perempuan itu sendiri merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak adanya unsur pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik.

Perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik dimana dia ingin berperan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Iapun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. Secara umum, kesejahteraan lahir bathin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan. Namun, berbagai kondisi baik kultural, sistemik dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses haknya untuk berperan dan bersuara dalam politik. Untuk menjawab tantangan dan kendala ini diperlukan lembaga masyarakat, pemerintahan dan partai yang gender responsif dalam strategi dan properempuan dalam program-programnya. Pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan menjangkau perempuan adalah dengan memberikan program yang tepat khususnya bagi perempuan, antara lain program pelatihan dan pendidikan politik yang mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan wawasannya. Program ini tidak dilakukan

secara instant top-down, tetapi berkesinambungan dan partisipatif (people driven) dari bawah (bottom-up).

1. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik pada dasarnya suatu masyarakat karena pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam politik menaruh harapan bahwa kebutuhan dan aspirasinya akan diperhatikan oleh para pemimpin dan perbuatan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi kebaikan bersama.⁶⁹

Pandangan ini Didukung oleh Pendapat Ibu Amperawati, yang menyatakan:

*“Partisipasi politik dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan perubahan pola pikir”*⁷⁰

Dalam proses peningkatan partisipasi politik diperlukan adanya sosialisasi, karena dengan adanya kegiatan sosialisasi ini Organisasi Kepala utara dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga diberikan motivasi akan pentingnya pendidikan politik. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada setiap bulan sekali kepada masyarakat di Kecamatan Kotabumi Selatan yang dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan Pendapat dari Ibu Anggraina, yang menyatakan:

“Partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik”.⁷¹

⁶⁹Gabriel A. Almond, “Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik”, dalam *Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 61.

⁷⁰ Ampera Wati, Ketua Kepala Utara, Wawancara 15 Maret 2023

⁷¹ Anggraina, Sekretaris Kepala Utara, Wawancara 15 Maret 2023

Informan Kedua menganggap bahwa Partisipasi Politik kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh karena itu perlu dilandasi dengan peningkatan partisipasi politik demi berhasil nya suatu pencapaian yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara (Kesatuan Perempuan Lampung Utara), sehubungan dengan hal ini, Ibu Amperawati, juga memiliki pendapat yang hampir sama terkait dengan definisi partisipasi politik, yang menyatakan:

“Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan”⁷²

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, mengenai partisipasi politik, maka kita dapat mengetahui antara definisi satu dengan definisi yang lainnya yang saling berkaitan. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat disimpulkan dari definisi partisipasi politik diatas, Pertama, Partisipasi sebagai keterlibatan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang kedua, partisipasi politik sebagai aspek yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi.

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan pemahaman.

Dalam Hal ini, Ibu Roslinawati mengungkapkan bahwa:

⁷² Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

“Penyuluhan yang dilakukan oleh Organisasi Kepala Utara bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat diterapkan perilaku dalam berpolitik”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Roslinawati, bahwa penyuluhan yang dilakukan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan dalam berpolitik.

b. **Pelatihan**

Pelatihan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan.

Dalam Hal ini, Ibu Anggraini mengungkapkan bahwa:
“Proses belajar sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Anggraini, terkait dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Organisasi Kepala Utara tentang adanya pengetahuan politik kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya politik.

c. **Pendampingan**

Pendampingan merupakan suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Tujuan utama dari pendampingan usaha adalah “kemandirian” pendampingan dilakukan agar terkontrol perkembangan telah adanya pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Dalam Hal ini, Ibu Suratini, Mengungkapkan bahwa:

“Pendampingan yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara yang bertujuan untuk dapat mendampingi masyarakat terkait pada kegiatan pelatihan Pendidikan politik”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Suratini, bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kepal Utara dengan mendampingi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan masyarakat tentang politik.

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Dalam hal ini, ibu amperawati mengungkapkan bahwa:

“yang menjadi sasaran (Pendidikan Politik) yaitu masyarakat yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan, dan diberikan bekal pengetahuan Pendidikan Adil Gender, Advokasi Dan Penguatan Jaringan Dan Kepemimpinan Perempuan”⁷³

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Amperawati terkait dengan pendidikan politik, Berawal dari penyadaran yang dilakukan oleh Kepal Utara kepada Para Perempuan di kecamatan kotabumi selatan yang pada saat itu berinisiatif dalam membentuk kelompok-kelompok diskusi dan membahas tentang permasalahan yang sedang dirasakan oleh perempuan yaitu kurangnya kesadaran pendidikan politik khususnya perempuan yang masih belum paham akan hak mereka dalam politik, salah satunya pemilihan umum mereka tidak menggunakan hak suara mereka untuk

⁷³ Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

menentukan calon pemimpin, dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi rendah bahkan mereka di tidak tau karena adanya money politik.

Sehubungan dengan pendidikan Politik oleh Organisasi Kepal Utara, ibu Anggraini menjelaskan bahwa:

“Kalau Organisasi Kepal Utara dapat mengedukasi kemasyarakat mengerti apa itu pendidikan dalam politik dan mengapa masyarakat harus tau pendidikan politik itu”⁷⁴

Berangkat dari berbagai data yang peneliti peroleh di lapangan, Pendidikan Politik nya adalah masyarakat Kotabumi Selatan, pendidikan politik juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat, agar masyarakat cerdas dan pintar dalam berpolitik. Dan mulai pendidikan politik inilah masyarakat mengetahui serta menekuni nilai, norma dan symbol politik.

3. Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik yakni proses dimana seseorang mendapat sikap, orientasi dan nilai-nilai terhadap kehidupan politik yang berlangsung di dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik terbagi menjadi dua yaitu pertama pendidikan politik dan kedua indoktrinasi politik. Pendidikan politik yaitu proses dialog antar pendidik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai, norma dan symbol politik. Terkait dengan sosialisasi politik, Ibu Ampera wati menyatakan bahwa:

“Saya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar baik itu yang tergabung dalam kelompok organisasi Kepal Utara ataupun tidak kedalam kelompok Organisasi Kepal Utara, itu perlu saya sosialisasikan karena banyak sekali pembodohan ataupun ketidaktahuan masyarakat terkait pada money politik, maka itu sosialisasi ini juga bertujuan

⁷⁴ Anggraina, Sekretaris Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

*dapat memberikan perubahan pola pikir masyarakat khususnya perempuan*⁷⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara Dan Observasi yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara terkait pada sosialisasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan harus pintar memilih calon pemimpin, maka itu perlu diberikan bekal pengetahuan melalui program pendidikan politik, Organisasi Kepal Utara tidak hanya memberikan pengetahuan saja tetapi dapat memberikan motivasi, agar para perempuan tidak mudah dalam menerima money politik, dan harus mempertimbangkan lagi dalam pemilihan umum baik itu Kepala Negara ataupun Kepala Daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rohaya yang pada saat itu ikut tergabung di Organisasi Kepal Utara, menyampaikan bahwa:

*“Pada saat itu, saya mengikuti kegiatan Organisasi Kepal Utara yaitu mengikuti kegiatan Sosialisasi, di dalam kegiatan sosialisasi tersebut saya harus bisa memahami pendidikan dalam berpolitik”*⁷⁶

Berdasarkan Hasil Wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Organisasi Kepal Utara tersebut, menjadikan kegiatan yang bertujuan untuk dapat memberikan bekal pengetahuan masyarakat baik itu masyarakat didalam kelompok Organisasi Kepal Utara maupun diluar dari pada kelompok Organisasi Kepal Utara.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Surmiyati, menyampaikan bahwa:

“iya walaupun saya tidak ikut bergabung dalam organisasi Kepal Utara, tetapi saya mempunyai andil dalam memilih hak dalam pemilihan umum, namun saya pernah beberapa kali menerima uang ataupun sembako dari berbagai partai,

⁷⁵ Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

⁷⁶Rohaya, Anggota Masyarakat yang ikut bergabung di Organisasi Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

dengan syarat harus mencoblos caleg tersebut, dan saya juga sempat mengajak kawan dan sanak saudara.⁷⁷

Berdasarkan Hasil Wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik itu untuk pemilihan kepala daerah maupun kepala Negara, pastinya ada money politik didalamnya, baik itu dalam bentuk uang maupun sembako, ini yang menjadi kaum perempuan tersebut yang belum memiliki pengetahuan politik, maka dengan itu penulis mengkaji dan menganalisis terkait pada pemberian bekal pengetahuan kepada masyarakat, agar masyarakat sedikit tau tentang permainan politik.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara dilaksanakan satu tahun dalam pertemuan setiap 2 bulan sekali. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Amperawati (Ketua Kepal Utara), yaitu Pendidikan Adil Gender, Advokasi Dan Penguatan Jaringan Dan Kepemimpinan Perempuan, Penyuluhan Deklarasi Dan Musywil Kesatuan Perempuan Lampung Utara, Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Wanita Milenial Mengawal Demokrasi Berintegritas, Penyuluhan tentang Bengkel Pendidikan Politik dengan Tema (Kaderisasi Dan Pendidikan Politik KPPI Lampung mewujudkan Perempuan bermartabat dan berdaya), Seminar Dan Musyawarah wilayah Kepal Utara (Menggugat Tanggung Jawab Negara terhadap perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, Penyuluhan (Memperkuat tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, Pengajian (Kedudukan Perempuan Dalam Islam), Sosialisasi (Pentingnya Suara perempuan dalam memajukan Negara), Penyuluhan (Membangun Karakter Perempuan yang Berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Dalam hal ini, Para perempuan yang diberikan pendidikan adil gender yaitu sosialisasi yang berkaitan tentang gender supaya para perempuan paham dulu tentang gender itu seperti apa, kemudian dalam melakukan advokasi dan

⁷⁷ Surmiyati, Anggota Masyarakat, Wawancara 15 Maret 2023

penguatan jaringan terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk kedalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil di dalamnya untuk memperjuangkan kaumnya. Kemimpinan perempuan sebagai upaya pemimpin perempuan, diperlukan sebuah kegiatan pelatihan, Sebuah Pelatihan untuk memperkuat pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan perubahan perilaku (kesadaran) dalam melakukan penguatan kepemimpinan perempuan serta advokasi mengenai isu atau permasalahan perempuan. Karena masih banyak tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam melaksanakan kegiatan dan program mereka. Oleh karenanya, pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan baik bagi para pemimpin maupun para kader organisasi perempuan sangat dibutuhkan.

Terlihat dari upaya Pendidikan politik oleh Organisasi Kepal Utara di Desa Tanjung Aman, dalam hal dari 10 Dusun yang ada di desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan sudah terlihat optimal dengan terlihatnya partisipasi politik perempuan di Desa Tanjung Aman.

Berdasarkan Data yang ada bahwa Perbandingan data pemilu perempuan tahun 2014 -2019 itu ada peningkatan partisipasi dalam pemilihan, yang peningkatan sangat signifikan pada tahun 2014 menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi sebesar 72 % pemilih perempuan dari 17.096 penggunaan hak pilih. Kemudian pada pemilu tahun 2019, secara bertahap partisipasi perempuan meningkat pada tahun tersebut menjadi 80% pemilih perempuan dari 23.022 Penggunaan hak pilih. Berdasarkan data hasil 2019 menunjukkan adanya keberhasilan Penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat Khususnya perempuan di Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Ukuran pemberdayaan politik berdaya atau tidak berdaya dilihat dari tingkat partisipasi, meningkatnya partisipasi ini dihubungkan dengan kegiatan Kepal

Utara yang intensif memberikan penyadaran, penyuluhan diskusi-diskusi atau seminar agar masyarakat sadar bahwa partisipasi dalam memilih itu adalah kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa tingkat partisipasi politik tinggi dalam kegiatan politik, dalam hal ini diharapkan adanya pengetahuan politik masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi politik masyarakat yaitu pengetahuan politik. Pengetahuan politik salah satunya dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan dengan cara sosialisasi politik oleh lembaga, partai, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan politik masyarakat, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, agama, lingkungan pergaulan, serta media massa yang digunakan oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan umum yaitu faktor internal meliputi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan kesadaran politik.

Dengan adanya pembentukan dari Rancangan Perpres Grand Design Keterwakilan Perempuan pada dunia politik dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan. Ada beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. "Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. Pendidikan politik ini dapat dilaksanakan mulai dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu yaitu umur 17 tahun yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi sehingga saat Pemilu nanti diadakan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat.

B. Tingkat Pengaruh Kepal Utara Dalam Pendidikan dan Sosialisasi Politik di masyarakat di Desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dalam melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“seperti yang disampaikan oleh Ibu Amperawati selaku Ketua Organisasi Kepal Utara, menyatakan pendapat bahwa”

“Pendidikan tentang partisipasi politik masyarakat merupakan proses pembelajaran yang dialami oleh masyarakat, baik secara formal maupun nonformal, terencana atau tidak terencana, sehingga mempengaruhi kesadaran berpartisipasi masyarakat”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Pada dasarnya, terdapat dua metode pembelajaran, yakni pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara tidak langsung. Pembelajaran langsung berarti bahwa pendidikan dalam aktivitas partisipasi mencakup pendidikan yang berdasar kepada learning by process atau learning by doing. Keberhasilan dalam pendidikan jenis ini tentu bergantung pada derajat keterlibatan pesertanya dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi

⁷⁸ Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

keterlibatannya maka semakin tinggi pula tingkat perubahan kognisi, afeksi dan psikomotorik politiknya. Pengalaman partisipasi yang dirasakan oleh masyarakat akan membuat masyarakat semakin terdidik secara politik.

Pendidikan merupakan instrumen penting yang sangat efektif untuk melakukan transformasi peradaban pada suatu masyarakat. Persepsi ini lahir arena pendidikan menyentuh aspek-aspek fundamental manusia, yaitu aspek kognitif (intelektual), aspek afektif (sikap mental dan penghayatan), dan aspek psikomotorik (skill). Dalam konteks ini, pendidikan memberikan pengaruh yang komprehensif dan signifikan terhadap kepribadian manusia. Kemajuan suatu masyarakat dalam tatanan bangsa yang sedang berkembang sangat bergantung penuh pada mutu pendidikan. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, dan akumulasi nilai-nilai sosial yang berakibat pada terjadinya krisis multidimensi dapat dicermati bahwa salah satu sumber penyebabnya adalah kelemahan dalam pembinaan dan pengembangan moral bangsa, khususnya menata moral pengembangan pendidikan.

Kemudian, dalam hal ini adanya Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap politik. Tujuan utama sosialisasi politik adalah pembentukan sikap serta watak para insan politik. Melalui proses sosialisasi politik individu-individu diharapkan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab.

Partisipasi politik juga dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan, Misalnya saja seseorang ingin menyalurkan hak suara mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah tapi tidak mengetahui tata cara Pemilihan Kepala Daerah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan dalam partisipasi politik seseorang. Hal inilah menjadikan peran sosialisasi politik sangat berpengaruh dalam partisipasi politik seseorang.

Sedangkan tingkat pendidikan partisipasi politik masyarakat merupakan proses pembelajaran yang dialami oleh masyarakat, baik secara formal maupun nonformal, terencana atau tidak terencana, sehingga mempengaruhi kesadaran berpartisipasi masyarakat. Pada dasarnya, terdapat dua metode pembelajaran, yakni pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara tidak langsung. Pembelajaran langsung berarti bahwa pendidikan dalam aktivitas partisipasi mencakup pendidikan yang berdasar kepada *learning by process* atau *learning by doing*. Keberhasilan dalam pendidikan jenis ini tentu bergantung pada derajat keterlibatan pesertanya dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi keterlibatannya maka semakin tinggi pula tingkat perubahan kognisi, afeksi dan psikomotorik politiknya. Pengalaman partisipasi yang dirasakan oleh masyarakat akan membuat masyarakat semakin terdidik secara politik.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anggraina, menyatakan pendapat bahwa:

“sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik”⁷⁹

Pendidikan yang dialami oleh masyarakat melalui keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas partisipasi. Semakin aktif masyarakat muncul untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi, semakin besar pula energi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perdebatan tentang berbagai isu kebijakan antar anggota masyarakat memunculkan semangat dan energi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berbagai upaya partisipasi lainnya seperti demonstrasi, kehadiran dalam rapat-rapat terbuka, rapat-rapat, rapat-rapat mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, gotongroyong, lobi dan negosiasi pada dasarnya memunculkan vitalitas masyarakat dalam

⁷⁹ Anggraina, Sekretaris Kepala Utara, Wawancara 15 Maret 2023

membangun daerahnya sendiri. Pada akhirnya sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik

Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang meemiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab masing masing dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

Seperti yang disampaikan oleh ketua Organisasi Kepal Utara, menyatakan Pendapat bahwa:

“Organisasi Kepal Utara ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pada politik, Organisasi tersebut dapat memberikan komitmen kepada masyarakat, oleh karena itu dengan adanya organisasi kepal utara, menciptakan suasana yang nyaman, dan adanya komunikasi yang baik antara anggota”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pada dasarnya, Ruang lingkup Organisasi akan membuat masyarakat menjadi betah didalam suatu organisasi. Salah satu hal yang membuat masyarakat nyaman berada didalam suatu organisasi yaitu dengan adanya komunikasi yang baik dan terbuka antara sesama anggota dan saling pengertian. Selain itu, salah satu hal yang paling utama untuk menumbuhkan dan meningkatkan loyalitas diri anggota masyarakat pada suatu organisasi.

Pemilihan Umum merupakan salah satu implementasi dari kedaulan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konop demokrasi. Dalam Negara Demokrasi, Pemilu menjadi agenda rutin yang diselenggarakan sebagai penyaluran partisipasi politik warga Negara, dimana salah satu bentuk partisipasi politik tersebut adalah penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anggraina, menyatakan pendapat bahwa:

“Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau

⁸⁰ Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah Negara”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan umum juga sangat penting untuk diimplemntasikan, karena dengan adanya pemilihan umum kita dapat memilih calon pemimpin untuk kedepannya.

Kurangnya kehadiran partisipasi perempuan di ranah politik itu disebabkan karena masih adanya kurang percaya diri, yang mengira bahwa perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kompetensi personal, termasuk modalitas sosial, jaringan dan juga finansial yang terbatas. Keterbatasan finansial untuk mengimbangi perilaku elit politik dari kalangan laki-laki ketika hendak menerapkan money politic (politik).

Kendala yang dihadapi adalah masih adanya anggapan sebagian masyarakat maupun anggota keluarga terkait keterlibatan perempuan dalam kontes politik, masih kurangnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, masih kurangnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan serta kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Amelia, menyatakan pendapat bahwa:

“Organisasi Kepal Utara memberikan pelatihan politik terhadap pemahaman masyarakat bahwa keterwakilan perempuan dalam kancah politik dapat berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam segala bidang. Perempuan biasanya lebih bisa dipercaya dan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan dan beban tugas yang diberikan kepadanya dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar

⁸¹ Anggraina, Sekretaris Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

belakang agama, suku, budaya, pendidikan, dan golongan, serta dapat menjadi anggota salah satu partai politik atau anggota legislative”⁸²

Berdasarkan Hasil Wawancara bahwa, menentukan bahwa, partai politik memberikan pemahaman serta pelatihan politik terhadap masyarakat bahwasanya keterwakilan perempuan dalam kancah politik pada berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam permasalahan perempuan itu sendiri. Dan sesama perempuan harus ada kepercayaan antara perempuan.

Sistem pemilu yang berlaku masih menjadikan perempuan sebatas syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. Hal ini justru semakin mengukuhkan bahwa perempuan hanya menjadi objek semata.

Berbicara tentang hak politik perempuan, tidak ada satu aturan pun yang tidak mengakui hak memilih dan dipilih perempuan. Pada kenyataannya, perempuan lebih banyak menggunakan salah satu haknya, yaitu sebagai pemilih semata. Dalam hal ini partisipasi politik perempuan rendah. Sementara haknya untuk dipilih kurang diaplikasikan, sebab hukum tidak memberi dorongan untuk hal itu.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Amperawati, menyatakan pendapat bahwa:

“Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak begitu mengenal calon perempuan yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya existensi perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenal tentang perempuan yang ikut dalam pemilihan Umum”⁸³

Berdasarkan Hasil Wawancara, bahwa Secara teori keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif harus diiringi

⁸² Ibu Amelia, Devisi Bidang Dan Penguatan Jaringan, Wawancara 15 Maret 2023

⁸³ Ampera Wati, Ketua Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

dengan proses sosialisasi, sedangkan dalam prakteknya sangat kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengenal calon-calon wakil perempuan di legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat.





BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal terkait partisipasi politik perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat di desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melalui hasil wawancara kepada beberapa responden, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan, namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik. Oleh sebab itu, fakta-fakta, data dan bukti akan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam parlemen. Partisipasi politik Perempuan dalam pemilihan kepala desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun sebagai simpatisan partai politik. Partisipasi politik perempuan di desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan social pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan yang nantinya akan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.
2. Pendidikan yang dialami oleh masyarakat melalui keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas partisipasi. Semakin aktif masyarakat muncul untuk terlibat dalam kegiatan

partisipasi, semakin besar pula energi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perdebatan tentang berbagai isu kebijakan antar anggota masyarakat memunculkan semangat dan energi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berbagai upaya partisipasi lainnya seperti demonstrasi, kehadiran dalam rapat-rapat terbuka, rapat-rapat, rapat-rapat mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, gotongroyong, lobi dan negosiasi pada dasarnya memunculkan vitalitas masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Pada akhirnya sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Terlihat dari upaya Pendidikan politik oleh Organisasi Kepal Utara di Desa Tanjung Aman, dalam hal dari 10 Dusun yang ada di Desa Tanjung aman Kecamatan Kotabumi Selatan baik di dusun 1,3,4,5,7,8,10 terlihat optimal dengan terlihatnya partisipasi politik perempuan di Desa Tanjung Aman.

Berdasarkan Data yang ada bahwa Perbandingan data pemilu perempuan tahun 2014 -2019 itu ada peningkatan partisipasi dalam pemilihan, yang peningkatan sangat signifikan pada tahu 2014 menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi sebesar 72 % pemilih perempuan dari 17.096 penggunaan hak pilih. Kemudian pada pemilu tahun 2019, secara bertahap partisipasi perempuan meningkat pada tahun tersebut menjadi 80% pemilih perempuan dari 23.022 Penggunaan hak pilih. Berdasarkan data hasil 2019 menunjukkan adanya keberhasilan Penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat Khususnya perempuan di desa Tanjung aman Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Ukuran pemberdayaan politik berdaya atau tidak berdaya dilihat dari tingkat partisipasi, meningkatnya partisipasi ini dihubungkan dengan kegiatan Kepal Utara yang intensif memberikan

penyadaran, penyuluhan diskusi-diskusi atau seminar agar masyarakat sadar bahwa partisipasi dalam memilih itu adalah kewajiban.

Tingkat partisipasi politik tinggi dalam kegiatan politik, dalam hal ini diharapkan adanya pengetahuan politik masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi politik masyarakat yaitu pengetahuan politik. Pengetahuan politik salah satunya dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan dengan cara sosialisasi politik oleh lembaga, partai, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan politik masyarakat, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, agama, lingkungan pergaulan, serta media massa yang digunakan oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan umum yaitu faktor internal meliputi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan kesadaran politik.

B. Rekomendasi

Peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum tahun 2015 khususnya yang dilaksanakan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses pemilihan umum secara sistematis perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih perempuan yang berada di daerah pinggiran dan dari berbagai kalangan dan lapisan sosial. Baik sosialisasi melalui media cetak audio atau audio visual. semina-seminar politik serta penyuluhan politik.
2. Peningkatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun partai politik akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Yatimin Abdulah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Amzah, 2006)

Ade Heryana, Organisasi Dan Teori Organisasi, (Tanggerang: Ade Heryana Institute, 2020).

Arhi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat, (Jakarta: CV Rajawali, 1985).

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara,1997.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian.

Dalman, Menulis Karya Ilmiah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Dra. Rohmalia Wahab, Psikologi Agama,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020).

Eko Handoyo Dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017).

Eko Handoyo Dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017).

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

Inu Kencana Syafeiie, Ilmu Politik, Edisi 2, (Jakarta: Renika Cipta, 2019).

Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar). Bandung. Sinar Baru Algensindo.

Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Kholid Narbuko Dan H. Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

M. Rush, Politics And Society: An Introduction to Political Sociology (Hemel: Hempstead Harvest Wheatsheap, 1992).

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), 327.

Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1981).

Miriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai Politik (Jakarta: Gramedia, 1981).

Miriam Budiardjo Dikutip Oleh Merphin Panjaitan. Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2011).

Prabowo, Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000).

Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Rasyidin Dan Fidhia Aruni, Gender Dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)..

Ridaya Laodengkowe, Mengatur Masyarakat Sipil, (Depok: Piramedia, 2010).

Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.

Sandu Siyoto and Muhammad Ali, DASAR METODOLOGI PENELITIAN, Ed. by Ayup, Literasi Media, 1st Edn (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

Siti Muslikhati, Feminisme Dalam Timbangan Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung, Tarsito, 1995)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik.

Yon Daryono Dkk, Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 1 (2020): 73.

Narasumber:

Ampera Wati (Ketua Kepala Utara), Wawancara 08 November 2022.

Anggraina, Sekretaris Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

Rohaya, Anggota Masyarakat yang ikut bergabung di Organisasi Kepal Utara, Wawancara 15 Maret 2023

Ibu Amelia, Devisi Bidang Dan Penguatan Jaringan, Wawancara 15 Maret 2023

Skripsi :

Ahclak Asmar Yasa, ‘Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilihan Pemula Di Kelurahan Kaluku Kec.Somba Opuk Kabupaten Gowa)’. (Skripsi Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negri Alauddin.

Rezky Awaliyah, Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Dalam Meningkatkan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar Pada Tahun 2020, (Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022).

Gabriel A. Almond, “Sosialisasi, Kebudayaan Dan Partisipasi Politik”, Dalam Perbandingan Sistem Politik, Peny. Mochtar Mas”oed Dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

M. Najib Ibrahim, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.

Gesit Yudha Puji Arsono, Persaingan Politik Perempuan Pada Pemilihan Umum 2024 Di Lampung (Studi Terpilihnya Asmara Dewi, Eva Dwiyana, Dan Dwie Aroem Hadiatie Sebagai Anggota Legislatif), (Universitas Lampung).

Nita Puspita, Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa), (Skripsi

Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muh.

Ririn Resita Simamora, *Perempuan Dalam Politik Studi Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur*, (Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019).

Siti Masruroh, 'Emansipasi Wanita Dan Pemberdayaan Politik Perempuan, (Studi Kasus Caleg Perempuan Di Kecamatan Natar Pada Pemilu 2014)', (Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Sumber Jurnal:

Dan Nimmo Dikutip Oleh Zaenal Mukarom. *Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, Nomor 9, (2008): 260. [Http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/681](http://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mediator/Article/ViewFile/1125/681).

Hafizur Rahman, Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah Dalam Modernisasi Ekonomi Masyarakat Islam Di Kota Pekanbaru (Tahun 2017), Jurnal: JOM FISIP Vol.4, No.2 Oktober 2017.

Rike Anggun Artisa, *Perempuan Dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi Diy*, *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No.1 (2014): 12.

Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPRRI. *Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel RUU Pemilu Peluang Untuk Keterwakilan Perempuan*, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.

Hubungan Patron-Client Adalah Hubungan Pertukaran Peran Yaitu Kelompok Masyarakat Dengan Tingkat Sosio-Ekonominya Tinggi (Patron) Berusaha Mempengaruhi Dan Melindungi Kelompok Yang Tingkat Sosioekonominya Rendah (Client). Sebagai Gantinya, Maka Kelompok C

Yon Daryono Dkk, Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 1 (2020): 73.

Nuridin, Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik, Jurnal Parapolitika, Vol 2, No 2, 2021.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 Nomor 2, Juli 2020.

Hafizur Rahman, Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah Dalam Modernisasi Ekonomi Masyarakat Islam Di Kota Pekanbaru Baru (Tahun 2017), Jurnal: JOM FISIP Vol.4, No.2 Oktober 2017. 7.

Sumber Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik.

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Ketua
Organisasi Kepal Utara**



**Perkumpulan Organisasi Kepal Utara
Dan Damar Provinsi Lampung**



**Acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan Kotabumi
Selatan**



**Musyawarah Cabang Gabungan
Organisasi Wanita (GOW)**



Sosialisasi Kerumah Warga Masyarakat



Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Wanita milenial mengawal Demokrasi berintegritas"



Memberikan Kegiatan Pelatihan Edukasi Pendidikan Politik



Bengkel pendidikan politik DPD KAUkus perempuan politik Indonesia (KPPU) provinsi lampung

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Pengurus Organisasi Kepal Utara

Nama:

Alamat:

Umur:

Tanggal dan jam wawancara

Instrumen	Indikator	Pedoman Wawancara
Ketua Organsasi Kepal Utara, Anggota Organisasi Kepal Utara	Partisipasi Politik Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Definisi partisipasi politik? 2. Bagaimana mekanisme partisipasi politik? 3. Bagaimana menurut saudara dalam meningkatkan partisipasi politik? 4. Bagaimana peningkatan partisipasi politik perempuan oleh organisasi Kesatuan perempuan lampung utara? 5. bagaimana peningkatan politik perempuan terhadap masyarakat? 6. Apa faktor-faktor yang mendukung meningkatnya partisipasi politik perempuan? 7. Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi

		politik?
		8. Apa bentuk-bentuk kegiatan organisasi kepal dalam meningkatkan partisipasi politik?
		9. Bagaimana menurut saudara bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan?
		10. Menurut anda sejauh mana perempuan penting untuk ikut serta dalam politik?
		11. Apa yang anda harapkan untuk kedepannya demi terwujudkan
		12. demokrasi yang sehat terutama mengenai perempuan?
		13. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan politik
Anggraini	Pemilu	1. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu?
Sekretaris		2. Apa pandangan anda terhadap pemilu?
Organisasi	Mekanisme	3. Menurut saudara apa tujuan dan fungsi pemilu?
Kesatuan	Pelaksanaan	4. Bagaimana upaya keterwakilan perempuan dalam pemilu?
Perempuan	Pemilu	5. Bagaimana peran perempuan dalam pemilu?
Lampung Utara		6. Apa dampak yang ditimbulkan ketika perempuan politik tidak berpartisipasi dalam

Amelia S. Kom
Anggota
Organisasi
Kesatuan
perempuan
lampung Utara
divisi
Pendidikan dan
penguatan
jaringan

Pendidikan
Politik
Mekanisme
Pelaksanaan
Pendidikan
Politik

-
- pemilu?
7. Apakah ada kendala politik perempuan dalam pemilu?
 8. Apa saja program yang dilaksanakan kepal utara dalam penyelenggaraan pemilu?
 9. Bagaimana meningkatkan partisipasi Politik Perempuan dalam proses Pelaksanaan Pemilihan Umum?
1. Apa urgensi pendidikan politik?
 2. Apa yang saudara ketahui tentang pendidikan politik?
 3. Apa tujuan dari pendidikan politik menurut anda?
 4. Bagaimana sistem pendidikan politik yang di jalankan oleh organisasi Kesatuan perempuan lampung utara?
 5. Mengapa pendidikan politik sangat penting bagi perempuan?
 6. Bagaimana pengaruh Kepala dalam pendidikan dan sosialisasi politik dimasyarakat khususnya perempuan?
 7. Bagaimana bentuk mensosialisasikan kegiatan yang di lakukan oleh Kepala?
 8. Apa saja materi-materi
-

Ketua Organsasi Kepal Utara	Organisasi Organisasi Kepal Utara	<p>yang di berikan setiap melakukan penyuluhan, sosialisasi, seminar?</p> <p>9. Berapa kali kegiatan dilakukan dalam setahun?</p> <p>10. Apa perbedaan masyarakat yang ikut tergabung dalam organisasi dan masyarakat yang tidak ikut tergabung dalam organisasi?</p> <p>11. Apa saja peran perempuan dalam pendidikan politik?</p> <p>12. Bagaimana mekanisme pendidikan dalam berpolitik?</p> <p>1. Apakah Organisasi Kesatuan Perempuan Lampung Utara, organisasi formal atau non formal?</p> <p>2. Apakah peran organisasi sangat penting?</p> <p>3. Bagaimana peran organisasi dalam masyarakat?</p> <p>4. Apa tujuan dari organisasi?</p> <p>5. Bagaimana peran dari organisasi kepal utara?</p> <p>6. Apa tujuan organisasi kepal utara?</p> <p>7. Bagaimana Organisasi Kepal Utara Dalam menciptakan Inovasi baru terkait pada pemilihan Umum?</p> <p>8. Bagaimana Organisasi Kepal Utara dengan</p>
-----------------------------------	---	--

Instansi Pemerintah dalam menjalin kerja sama agar Pemilihan umum dapat berjalan dengan efektif?

9. Berapa anggota organisasi kepal utara yang sudah tergabung?
-



Instrumen	Indikator	Pedoman Wawancara
Ibu Rohaya (Masyarakat), Ibu Surmiyati (Masyarakat)	Partisipasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda ketahui tentang politik? 2. Bagaimana pandangan anda terhadap politik? 3. bagaimana pandangan anda terhadap organisasi kepal utara yang sudah berusaha meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik? 4. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan organisasi kepal seperti penyuluhan, sosialisasi, seminar-seminar yang di adakan kepal? 5. Menurut anda seberapa penting pendidikan politik bagi perempuan? 6. Pada saat pemilu berlangsung Apakah anda memilih calon tersebut dengan visi-misinya?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar
Lampung, tlp. (0721) 703289*

Data Wawancara skripsi

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Narasumber : Ampera Wati
Jabatan : Ketua Organisasi Kepal Utara
Waktu Wawancara : 15 Maret 2023
Tempat : Di Kabupaten Lampung Utara
Keterangan : Tatap Muka

Q: Menurut ibu apa si bu definisi Partisipasi Politik?

A: Menurut saya Partisipasi politik itu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan perubahan pola pikir itu sendiri, Dan juga Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan”

Q: untuk Mekanisme Partisipasi Politik itu sendiri gimana bu?

A: Partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik

Q: Bagaimana si bu menurut ibu dalam meningkatkan partisipasi politik?

A: menurut saya kita harus Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat, Membangun ruang untuk

mengelola partisipasi masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah Dan Penguatan Jejaring Struktur Organisasi Kepal Utara.

Q : Untuk peningkatan partisipasi politik perempuan ini oleh organisasi kepal utara? ini seperti apa bu?

A : Peningkatan partisipasi politik perempuan, jadi peningkatannya kan ya, jadi dengan di adakanya Pelatihan-pelatihan pada kader perempuan lampung utara, pelatihannya yang mengenai politik kan gitu, misalnya politik praktis gitu, jadi kita melaksanakan berbagai macam pelatihan

Q: Kalau untuk Peningkatan politik perempuan terhadap masyarakat itu seperti apa bu?

A: Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik itu memerlukan dukungan semua pihak, demi mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik. Dan juga Merealiskan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik dan itu harus konsisten diupayakan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baikbaik seperti itu.

Q : Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi Politik?

A : Adanya perasaan insecure karena tingkat pendidikan serta ekonomi yang rendah, serta perbedaan jenis kelamin. Hal ini masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai, dimana laki-laki dianggap lebih pantas untuk berada di dunia politik daripada perempuan dan orang-orang yang berstatus sosial ataupun ekonomi tinggi cenderung lebih aktif serta banyak kesempatan untuk berpartisipasi daripada yang berstatus sosial rendah. Kemudian, keluarga juga menjadi faktor pendorong ataupun penghambat seseorang dalam berpartisipasi dalam politik.

Q : Untuk bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik perempuan ini seperti apa?

A : ya itu tadi, pertama bentuk kegiatan partisipasi politik perempuan seperti pada saat Pelatihan-pelatihan kita mengajarkan supayasanya, ada kita yang berani ikut kedalam musrenbang, termasuk salah satu tadi saya ikut dalam kegiatan musrenbang. Itu udah salah satu bentuk partisipasi politik perempuan karna musrenbang itu kan kita mengajukan pendapat itu juga sudah salah

satu politik perempuan, eee berani mengajukan pendapat, ikut kedalam kegiatan-kegiatan di kecamatan di desa ataupun kelurahan itu juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik perempuan, ikut serta dalam pemilu

Q : Menurut ibu sendiri pemilu itu seperti apa si bu

A : Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah Negara itu sendiri.

Q: Nahh apa si bu dampak yang ditimbulkan ketika perempuan politik tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum?

A: Pendidikan yang dialami oleh masyarakat melalui keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas partisipasi. Semakin aktif masyarakat muncul untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi, semakin besar pula energi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perdebatan tentang berbagai isu kebijakan antar anggota masyarakat memunculkan semangat dan energi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berbagai upaya partisipasi lainnya seperti demonstrasi, kehadiran dalam rapat-rapat terbuka, rapat-rapat, rapat-rapat mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, gotongroyong, lobi dan negosiasi pada dasarnya memunculkan vitalitas masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Pada akhirnya sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik

A : Disini Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak begitu mengenal calon perempuan yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya existensi perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga banyak masyarakat

yang tidak mengenal tentang perempuan yang ikut dalam pemilihan Umum

Q : Kalau tentang kendala nih bu apakah ada kendala politik perempuan dalam pelaksanaan pemilu?

A : Nahh itu kadang kadang kita di jejal keterwakilan 30% perempuan itu si memang sebenarnya udah ada undang-undangnya tetapi dalam pelaksanaannya belum seluruhnya di laksanakan oleh panitiapanitia, seperti KPU dan BAWASLU ataupun partai politik. Hanya dibuat itu perempuan sebagai pelengkap. Tapi kami selaku organisasi kepal utara ini selalu mengajarkan kepada . Masyarakat khusus perempuan bahwa harus berani

Q: kalau untuk program yang dilaksanakan kepal utara dalam penyelenggaraan pemilu ada ga bu

A : Iyaaa, dalam penyelenggaraan seperti sekarang kan kita mengajak, menghayo hayo kan masyarakat perempuan siapa saja yang mau ikut jadi panitia pemilu, siapa yang mau maju di dalam pencalonan politik seperti legislatif, iya seperti itu tadi dengan sosialisasi atau dengan pendidikan politik itu tadi, karna perempuan itu harus di didik supaya mandiri supaya mau dan berani untuk maju, yang jelas dalam pendidikan politik ini kita harus merubah mensesd perempuan dalam pendidikan atau sosialisasi itu karna perempuan ini kan kebanyakan diam maka dari itu kita perlu tanamkan keberanian di diri mereka

Q: Bagaimana si bu Pendidikan Politik yang dijalankan oleh Organisasi Kepal Utara?

A: Pendidikan politik yang diselenggarakan itu perlu kita ketahui bahwa sudah diatur dalam peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol. Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol merupakan sarana membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda ataupun tua Dan pendidikan politik sangatlah penting untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami oleh rakyat Indonsia serta generasi muda agar rakyat tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Dengan

dilaksanakannya pendidikan politik oleh Bakesbangpol diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” gitu.

Q: menurut ibu Mengapa pendidikan politik sangat penting bagi perempuan?

A: Sangat penting sekali untuk Meningkatkan kesadaran kritis perempuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender. Agar mereka tidak hanya diam dan bungkam saja

Q : Kemudian untuk pengaruh kepal dalam pendidikan dan sosialisasi politik dimasyarakat seperti apa bu? Khususnya perempuan?

A : Sebenarnya dia agak susah kalau untuk perempuan, tapi setidaknya pada saat ada momen-momen itu kita menghayo hayo mengajak anggota kepal itu sendiri dan masyarakat umum pada umumnya khusus itu perempuan untuk ikut serta berpartisipasi, jadi kita juga mencari jalan untuk mereka supaya ikut tergabung, dan memberi dukunga untuk dia maju misalnya ingin menyalon kepala desa, rt, atau re seperti itu, dan yang menjadi sasaran (Pendidikan Politik) yaitu masyarakat yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan, dan diberikan bekal pengetahuan Pendidikan Adil Gender, Advokasi Dan Penguatan Jaringan Dan Kepemimpinan Perempuan ya seperti itulah

A : dan juga di sini Pendidikan tentang partisipasi politik masyarakat merupakan proses pembelajaran yang dialami oleh masyarakat, baik secara formal maupun nonformal, terencana atau tidak terencana, sehingga itu sangat mempengaruhi

Q : Dalam mensosialisasikan kegiatan kepal utara itu bentuk sosialisasinya seperti apa

A : Yaa dengan itu tadi, jadi setiap desa kita mengumpulkan ibu-ibu untuk melaksanakan sosialisasi tentang partisipasi politik itu, dan di sini Saya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar baik itu yang tergabung dalam kelompok organisasi Kepala

Utara ataupun tidak kedalam kelompok Organisasi Kepal Utara, itu perlu saya sosialisasikan karena banyak sekali pembodohan ataupun ketidaktahuan masyarakat terkait pada money politik, maka itu sosialisasi ini juga bertujuan dapat memberikan perubahan pola pikir masyarakat khususnya perempuan

Q : Kalau untuk materinya sosialisasi itu berbeda-beda atau gimana bu?

A : Iya kadang berbeda-beda kadang ada yang sama, yaa tergantung kebutuhankebutuhan pada saat itu

Q : Kalau untuk narasumber di setiap melakukan kegiatan itu bu, itu di pimpin ibu sendiri atau ada yang lain?

A : Narasumber ya kita sesuai kebutuhan, bisa dari KPU, Bawaslu, bisa dari provinsi, teman temen organisasi perempuan

Q : Kegiatan itu dilakukan berapa kali dalam setahun bu

A : Trgantung kalau untuk itu, karna kan kepal utara ini kan bergerak di 5 bidang yang di anut, ada ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan. Jadi setiap kegiatan itu kan ganti-ganti

Q : Kalau untuk materinya sendiri bagaimana bu?

A : Ya tentang politik, seperti apa yang saya bicarakan itu tadi kita beda beda materinya, ya disesuaikan lah, misalnya materi tentang UUD partai politik, supaya paham dulu bahawa ada lo 30%keterwakiln perempuan. itu yang politik praktis.

Q : Kalau penyuluhan untuk maraknya money politic itu bu?

A : nahh ya itu pasti kami memberikan pengetahuan tentang hal itu karna kan perempuan ini apa lagi ibu-ibu itu kan main Terima trima saja tanpa memikirkan kedepannyakedepannya

Q : Ada tidak bu bedanya masyarakat yang ikut kepal dan masyarakat yang tidak ikut kepal

A : Ada sangat terlihat bedanya, untuk perempuan yang ikut kepal ini kan dia harus tau dulu dasar nya organisasi ini untuk kemajuan perempuan di lingkungan itu seperti apa dan kita selalu ajarkan dari hal kecil hingga hal besar dalam bentuk apapun, dan untuk perempuan yang tidak ikut tergabung ini yahh bisa di lihat dari kita mengajak nya saja untuk mengikuti kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, seminar mereka saja tidak mau, mereka hanya mau kalau misalnya ada perkumpulan membagi adanya sembako nah baru mereka cepat sekali

Q: Bagaimana Organisasi Kepal Utara Dalam menciptakan Inovasi baru terkait pada pemilihan Umum?

A: Kegiatan partisipasi politik perempuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh karena itu perlu dilandasi dengan peningkatan partisipasi politik demi berhasil nya suatu pencapaian yang dilakukan oleh Organisasi Kepal Utara (Kesatuan Perempuan Lampung Utara). Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pendidikan politik karena didalam kegiatan sosialisasi juga terdapat pemberian bekal pengetahuan tentang pendidikan dalam berpolitik, seperti bagaimana mekanisme pemberian suara pada pemilihan umum, dan bagaimana juga mencegah adanya money politik dan belajar juga untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan kemauan masyarakat, khususnya untuk para perempuan agar sesuai dengan hak pilih mereka, seperti hal nya mempunyai hak untuk berpolitik, menyuarakan aspirasi untuk ikut berkontribusi dalam memilih pemimpin untuk kemajuan baik itu untuk Negara maupun untuk masing masing daerah.

Q: Bagaimana si bu Organisasi Kepal Utara dengan Instansi Pemerintah dalam menjalin kerja sama agar Pemilihan umum dapat berjalan dengan efektif?

A: Dalam Hal ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menggelar Kegiatan

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu. Sosialisasi kali ini mengundang Organisasi perempuan seperti Organisasi Kepal Utara yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini bertujuan Untuk menambah wawasan kepada perempuan terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan partisipatif, serta Untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran atau kecurangan selama proses pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2019.

Q: Bagaimana Peran Organisasi Kepal Utara?

A: peranan organisasi berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik.

Q: Bagaimana peran organisasi dalam masyarakat?

A: Ormas itu punya tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Baik pemberdayaan internal anggota, maupun terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan sosial, penyalur aspirasi, pemelihara dan pelestari norma kehidupan masyarakat.

Q: Apa tujuan dari organisasi menurut ibu?

A: Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan untuk mencapai tujuan Bersama.

Q: Apakah peran organisasi sangat penting menurut ibu?

A: iya penting karna Berorganisasi memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berorganisasi mental kepemimpinan akan terbentuk dan melatih diri untuk dapat mengeksekusi keputusan. Tanpa pernah ikut berorganisasi tidak akan mungkin bisa memimpin untuk jenjang yang lebih tinggi dan cakupan yang lebih luas.

Q : Untuk organisasi kepal utara ini bagaimana si bu

A : Organisasi Kepal Utara ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pada politik, Organisasi ini memberikan komitmen kepada masyarakat, oleh karena itu dengan adanya organisasi kepal utara, menciptakan suasana yang nyaman, dan adanya komunikasi yang baik antara anggota”

Q : Untuk anggota kepal utara nya sendiri sudah berapa orang yang ikut tergabung bu

A : sudah 200san lebih lah. Dan yang sudah ada ini di 5 kecamatan, kecamatan kotabumi selatan, kecamatan kotabumi utara, kotabumi kota, abung selatan dan abung timur

Q: Menurut anda sejauh mana perempuan penting untuk ikut serta dalam politik?

A : perempuan dengan ikut serta dalam politik akan memberikan keseimbangan dalam mengisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan

Q : Apa yang anda harapkan untuk kedepannya demi terwujudkan demokrasi yang sehat terutama mengenai perempuan?

A : harapannya adalah agar kualitas dan kuantitas keteraturan politik bagi perempuan dapat meningkat serta perlindungan dan jaminan bagi perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

Q : Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan?

A : tewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong keterlibatan perempuan di parlemen dan mengikis ketimpangan gender dalam politik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar
Lampung, tlp. (0721) 703289*

**Data Wawancara skripsi
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Narasumber : Anggraina
Jabatan : Sekretaris Organisasi Kepal Utara
Waktu Wawancara : 15 Maret 2023
Tempat : Di Kabupaten Lampung Utara
Keterangan : Tatap Muka

Q : Menurut ibu apa si-bu definisi Partisipasi Politik?

A : iya sama saja sejalan dengan ibu ampera bahwa *Partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik*

Q: Bagaimana si bu menurut ibu dalam meningkatkan partisipasi politik?

A: Menurut saya dalam meningkatkan harus dari kesadaran masyarakat itu terlebih dahulu seperti yang sudah ibu ampera katakan bahwa tadi dalam meningkatkan partisipasi politik kita harus Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan

empati masyarakat, itu aja si gak jauh beda pendapat ibu dengan ibu amperanya

Q : Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi Politik?

A : Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambatnya terutama di masyarakat nya sendiri yang tidak mau ikut berpartisipasi di dalam politik itu sudah menjadi salah satu hambatan bagi kami

Q : Untuk bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik perempuan ini seperti apa?

A : Bentuk- bentuk kegiatan nya seperti membuat forum diskusi, seperti halnya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan Pelatihan-pelatihan atau kunjungan-kunjungan kita terhadap masyarakat khusus perempuan untuk memberikan dorongan atau bisa jadi memotivasi mereka agar berani mewakili perempuan

Q : Menurut ibu sendiri pemilu itu seperti apa si bu

A : *Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat itu sendiri untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah Negara*

Q: menurut ibu bagaimana si bu peran perempuan dalam Pemilu?

A: perempuan dapat berperan aktif dalam Pemilu seperti Menjadi Penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan, seperti yang di jelaskan ibu ampera

Q: apa si bu dampak yang ditimbulkan ketika perempuan politik tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum?

A : Dampaknya sangat terlihat jelas dari segi voting suara itu sudah sangat jelasjelas, dan untuk hal ini saya begitu merasa perihatin sebab dilihat dari ketika perempuan tidak ikut berpartisipasi itu sudah sangat tidak membantu untuk mengembangkan suatu daerah untuk kedepannya

Q: khusus untuk ibu dari pandangan ibu sendiri Bagaimana si meningkatkan partisipasi Politik Perempuan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum?

A: Partisipasi perempuan di dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Q: menurut ibu apakah penting bagi kita untuk memahami pendidikan politik?

A: penting karna Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membantu individu menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan responsif dalam masyarakat demokratis

Q : untuk pengaruh kepala dalam pendidikan dan sosialisasi politik dimasyarakat seperti apa bu? Khususnya perempuan?

A : *Kalau Organisasi Kepal Utara dapat mengedukasi masyarakat mengerti apa itu pendidikan dalam politik dan mengapa masyarakat harus tau pendidikan politik itu karna itu sangat penting karna itu adalah akar nya, dan sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik”*

Q : Dalam mensosialisasikan kegiatan kepal utara itu bentuk sosialisasinya seperti apa

A : Seperti yang di katakan ibu ampera tadi bahwa kita ada sosialisasi, penyuluhan, seminar semacam itu lah

Q : Apa saja si bu peran perempuan dalam pendidikan menurut ibu?

A: Perempuan memiliki peran sebagai pusat keluarga dirumah dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya, perempuan juga memiliki peran mulia dalam menjadi seorang pendidik karena dari perempuanlah akan terlahir anak-anak yang berakhlak dan berkarakter.

Q: Bagaimana si bu Mekanisme Pendidikan dalam berpolitik?

A: sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik

Narasumber : Amelia
 Jabatan : Anggota Organisasi Kepal Utara
 Waktu Wawancara : 15 Maret 2023
 Tempat : Di Kabupaten Lampung Utara
 Keterangan : Tatap Muka

Q : Menurut ibu apa si bu definisi Partisipasi Politik?

A : Partisipasi politik itu keikutsertaan kita dalam kegiatan-kegiatan berpolitik seperti ya ini ikut kedalam organisasi kepal utara ini contohnya

Q: Menurut ibu bagaimana si Mekanisme Partisipasi Politik itu sendiri gimana bu?

A: Sejalan dengan apa yang disampaikan ibu ampera tadi bahwa Partisipasi politik itu sendiri, itu diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik

Q : Bagaimana menurut ibu dalam meningkatkan partisipasi politik

A : Dalam meningkatkan partisipasi politik kita ada banyak cara salah satunya meningkatkan pendidikannya terlebih dahulu baru kita ajak ikut serta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau politik seperti seminar politik, diskusi-diskusi politik seperti itu

Q : Bagaimana peningkatan partisipasi politik perempuan oleh organisasi Kesatuan perempuan lampung utara?

A : Cukup baik, karna di sini organisasi kepal utara ini selalu memberikan suatu edukasi yang sangat bermanfaat dalam hal apapun, baik itu politik, hukum, ekonomi atau yang lainnya

Q : Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan partisipasi politik perempuan menurut ibu?

A : Faktor-faktor yang mendukung itu seperti menurut saya ini yah, seperti pengetahuan dalam bidang politik itu sendiri dan penghambatnya yah susah untuk sebagian orang untuk di berikan edukasi

Q : Apa bentuk-bentuk kegiatan organisasi kepal dalam meningkatkan partisipasi politik?

A : Seperti yang selalu saya ikuti seminar, penyuluhan, diskusi, sosialisasi

Q : .Apa yang ibuketahui tentang pemilu?

A : Pemilu itu kan kepanjangan dari pemilihan umum, jadi yah pemilu itu kita ikut berkontribusi dalam pemilihan seperti contohnya kecilnya pemiliha kepala desa, bupati, gubernur, presiden seperti itu

Q : Bagaimana peran perempuan dalam pemilu?

A : oh tentu Peran perempuan dalam pemilu itu sangat penting sebab kan kita memiliki hak untuk bersuara dan memilih sesuai keinginan kita

Q. Mengapa pendidikan politik sangat penting bagi perempuan?

A : Ya sangat penting lah itu buka cuma politik saja tapi pendidikan yang lain juga kita harus paham dan mengerti supaya kita tidak gampang dibodohoi

Q : Bagaimana pengaruh Kepal dalam pendidikan dan sosialisasi politik dimasyarakat khususnya perempuan?

A : nahh jadi begini di sini kita *selaku pengurus Organisasi Kepal Utara ini memberikan pelatihan politik terhadap pemahaman masyarakat bahwa keterwakilan perempuan dalam kancah politik dapat berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam segala bidang. Kaena perempuan biasanya lebih bisa dipercaya dan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan dan beban tugas yang diberikan kepadanya dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, pendidikan, dan golongan, serta dapat menjadi anggota salah satu partai politik atau anggota legislative*

Q : Bagaimana bentuk mensosialisasikan kegiatan yang di lakukan oleh Kepal?

A : Seperti yang saya katakan tadi bentuk dari kegiatan kami ini diskusi, seminar, penyuluhan, sosialisasi, kunjungan-kunjungan, pertemuan musyawarah, silaturahmi seperti itu

Q : Apa saja materi-materi yang di berikan setiap melakukan penyuluhan, sosialisasi, seminar?

A : Untuk materinya si tergantung yahh jadi berbeda beda tergantung situasinya pembahasannya seperti apa itu saja

Q : Berapa kali kegiatan dilakukan dalam setahun?

A : Cukup Sering, Seperti di tahun 2023 ini kita sudah melakukan 3 kali pertemuan

Q: Apakah peran organisasi sangat penting?

A : Sangat penting bagi yang mengerti manfaatnya, pertma kita banyak temen kedua kita bisa belajar bersama-sama, belajar memahami sesuatu juga banyak, banyak yang bisa di pelajari dan semenjak sya ikut tergabung dalam organisasi ini sya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang blm sya dapatkan sebelumnya

Q : Apa tujuan organisasi itu masuk ke organisasi ini?

A : Tujuan msuk ke organisasi itu untuk menambah wawasan saya buktinya kan sekarang sya jadi banyak paham hal hal baru yg belum sya temui sya pelajari begitu seterusnya akan ada hal hal baru yang belum kita temui dan harus kita pelajari



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar
Lampung, tlp. (0721) 703289*

**Data Wawancara skripsi
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
OLEH KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA
DI KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Narasumber : Rohaya
Jabatan : Masyarakat
Waktu Wawancara : 15 Maret 2023
Tempat : Di Kabupaten Lampung Utara
Keterangan : Tatap Muka

Q : apa yang ibu ketahui tentang politik?

A : ya politik itu seperti kampanye dan sejenisnya itu

Q : Bagaimana pandangan ibu terhadap pendidikan politik?

A : Pandangannya, ya gk tau setau saya pendidikan politik itu seperti kita belajar PKN waktu sekolah dulu sya pernah belajar PKN dan itu belajr tentang politik juga ya

Q : Apakah ibu tahu organisasi kepal Utara?

A : Iya tau, Organisasi itu pernah bikin pertemuan di sini

Q : Apakah pertemuan semacam sosialisasi, penyuluhan, seminar bu?

A : Ya semacam itu lah

Q : Apakah ibu pernah mengikuti kegiatan organisasi tersebut?

A : iya pada saat itu, saya mengikuti kegiatan Organisasi Kepal Utara kegiatan Sosialisasi, di dalam kegiatan sosialisasi itu kita di ajarkan harus bisa memahami pendidikan dalam berpolitikberpolitik tapi saya tidak sampai selesai mengikutinya karna ada kegiatan jadi saya pulang

Q : Menurut ibu bagaimana si pandangan organisasi kepal utara ini yang sudah berusaha meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik

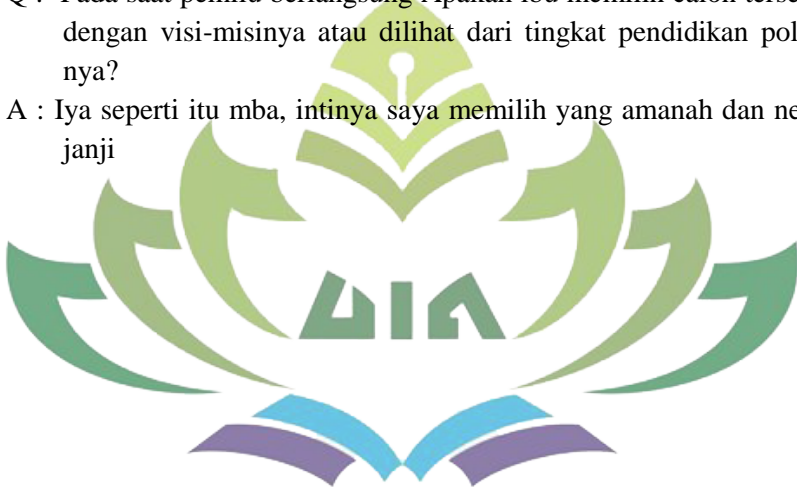
A : Ya baik, mereka selalu ngadain pertemuan, tetapi saya tidak pernah ikut

Q : Menurut pandangan ibu sendiri tentang Pendidikan Politik ini bagaimana si bu?

A : Ya enggak gimana-gimana, ya inti nya itu pembelajaran pendidikan itu kan pembelajaran

Q : Pada saat pemilu berlangsung Apakah ibu memilih calon tersebut dengan visi-misinya atau dilihat dari tingkat pendidikan politiknya?

A : Iya seperti itu mba, intinya saya memilih yang amanah dan nepat janji



Narasumber : Surmiyati
Jabatan : Masyarakat
Waktu Wawancara : 15 Maret 2023
Tempat : Di Kabupaten Lampung Utara
Keterangan : Tatap Muka

Q : apa yang ibu ketahui tentang politik?

A : Politik itu semacam kita mau mencalonkan diri kan seperti mencalonkan diri sebagai DPR, BUPATI, dan ya itu lah

Q : Apakah ibu pernah mempelajari pendidikan politik?

A : Iya pernah waktu di sekolah

Q : Bagaimana pandangan ibu terhadap pendidikan politik?

A : Gimana yah intinyai, saya ikut saja lah sama, sama ibu ini

Q : apakah ibu tahu tentang organisasi kepal utara?

A : Iya tahu

Q : Menurut ibu bagaimana si pandangan ibu terhadap organisasi kepal utara ini yang sudah berusaha meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik

A : Yaa kalau saya menilainya baik baik saja karna itu kan hal positif

Q : Apakah ibu pernah mengikuti kegiatan organisasi kepal seperti penyuluhan, sosialisasi, seminar-seminar yang di adakan kepal?

A : Pernah tapi cuma 2 atau 1 kali saya lupa, iya walaupun saya tidak ikut bergabung dalam organisasi Kepal Utara, tetapi saya mempunyai andil dalam memilih hak dalam pemilihan umum, tapi saya pernah beberapa kali menerima uang ataupun sembako dari berbagai partai, dengan syarat harus mencoblos caleg tersebut, dan saya juga sempat mengajak kawan dan sanak saudara.

Q : Maksudnya ibu apakah seperti money politic

A : Money politic itu apa

Q : Seperti Serangan fajar bu

A : Ohh Iya

Q : Menurut ibu pendidikan politik khususnya untuk perempuan itu penting tidak bu?

A : Antara penting dan tidak penting yah namanya sudah ibu-ibu udah gak mikirin belajar lagi, mikirin nnya ngurusin anak, suami itu yang paling penting

Q : Pada saat pemilu berlangsung Apakah ibu memilih calon tersebut dengan visi-misinya

A : Iya, yang memberi saya saja lah itu yang saya pilih





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 219 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PEMIKIRAN
POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Akademik dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dosen Pembimbing skripsi.
 2. mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1(satu) diatas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 22 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Raden Intan Lampung
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
 5. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2021, tentang Standar Biaya Masuk; Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 025.04.2.424260/2022, tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku Satu Tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 10 Februari 2023

Dekan,



Ahmad Isnaeni

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Intan Lampung;
3. Kabag Keuangan UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN I : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 219 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NO	NAMA/NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Firda Septiyani / 1931040082	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	1. Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si. 2. Gesit Yudha, M.I.P.

PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
DEKAN,



Ahmad Isaeni





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1566 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN OLEH KESATUAN PEREMPUAN
 LAMPUNG UTARA DI DESA TANJUNG AMAN KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
FIRDA SEPTIYANI	1931040082	FUSA/ PPI

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/ Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrome 1 Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B. 264 / UN.16 / DU.1 / PP.009.7/02/2023 28 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth
Ketua Organisasi Kesatuan Perempuan Lampung Utara

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Firda Septiyani/ 1931040082
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Di Ketua Organisasi Kesatuan Perempuan Lampung Utara.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Tembusan:
Pemikiran Politik Islam



KESATUAN PEREMPUAN LAMPUNG UTARA (KEPAL UTARA)

Sekretariat : Jl. Pahlawan Gg. Naga No. 335 kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 22020

Nomor : 14/B/KP/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan telah selesai
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
Fakultas Ushulluddin dan Studi Agama
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan surat yang kami terima No B264/UN.16/DU.1/PP.009.7/02/2023,
tertanggal 28 FEBUARY 2023 prihal mohon izin mengadakan research/penelitian atas nama

Nama : FIRDA SEPTIYANI
Jurusan : Pemikiran politik islam
Judul Skripsi : Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan
Perempuan Lampung Utara dikecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan research/penelitian di Organisasi
Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Dari Tanggal 01 Maret 2023 S/D 10 JUNI 2023).
Demikian pemberitahuan dari kami untuk kiranya dapat dipergunakan sebagaimana
Mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

Wasallamu'allaikum Wr.Wb



Dra. Amperawaty Berangai Putri
Ketua

new

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	7%
2	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
3	constitution.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uksw.edu Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.pin.or.id Internet Source	1%
9	anzdoc.com Internet Source	1%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
11	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	<1%
12	www.dictio.id Internet Source	<1%
13	jurnalfuad.org Internet Source	<1%

14	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
16	bared18.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
19	www.kafaah.org Internet Source	<1 %
20	id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
22	mampu.or.id Internet Source	<1 %
23	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.mpr.go.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
26	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
27	qdoc.tips Internet Source	<1 %
28	thesis.umy.ac.id Internet Source	<1 %
	repository.uinsu.ac.id	

29	Internet Source	<1 %
30	robbieochu.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
32	es.scribd.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
35	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
37	abdujaelani78.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
39	Erik Kusuma, Ayu Dewi Nastiti, R.A Helda Puspitasari, Dwining Handayani. "Edukasi Pencegahan dan Penanganan Diabetes Mellitus Serta Skrining Penderita Diabetes Mellitus", JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), 2022 Publication	<1 %
40	faridromandhoni.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

42	sosiologiunsyiah2010.wordpress.com Internet Source	<1%
43	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
44	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1%
45	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
46	Islamiyatur Rokhmah. "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (KAJIAN Ayat-Ayat Kebidanan)", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah, 2018 Publication	<1%
47	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
48	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1%
49	www.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 10 words
Exclude bibliography On